



**KETERLIBATAN *CIVIL SOCIETY ASSEMBLY FOR PEACE (CAP)*
DALAM PENGUATAN *CIVIL SOCIETY* DI SELATAN THAILAND**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Pemikiran Politik Islam*

**Oleh:
HAFEEZ ABU
NIM. 1830307006**

**JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUBANGKAR
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **HAFEEZ ABU**, Nim **1830307006** dengan judul **KETERLIBATAN *CIVIL SOCIETY ASSEMBLY FOR PEACE* (CAP) DALAM PENGUATAN *CIVIL SOCIETY* DI SELATAN THAILAND**, memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 15 Agustus 2022
Pembimbing

NOVI BUDIMAN, M. Si
NIP: 201801011031

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **HAFEEZ ABU**, NIM : **1830307006**, dengan judul **KETERLIBATAN CIVIL SOCIETY ASSEMBLY FOR PEACE (CAP) DALAM PENGUATAN CIVIL SOCIETY DI SELATAN THAILAND** telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada Jumat, 04 Agustus 2022 dan dinyatakan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Strata Satu (S-1) dalam jurusan Pemikiran Politik Islam.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Novi Budiman.,S.IP.,M.Si NRK.201801011031	Penguji Pendamping 1		
2	Ulya Fitri M,Si NIP.198511122019032013	Penguji Utama		
3	Mhd. Alfahjri Sukri NIP. 199205202019031006	Anggota Utama		

Batusangkar, 15 Agustus 2022
Mengetahui
**Dekan Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah**

Dr. Akhyar Hanif, M.Ag
NIP. 196801201994031004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAFEEZ ABU
NIM : 1830307006
Program/Strata : Sarjana/1
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **KETERLIBATAN *CIVIL SOCIETY ASSEMBLY FOR PEACE (CAP)* DALAM PENGUATAN *CIVIL SOCIETY* DI SELATAN THAILAND** adalah benar karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 15 Juli 2022
Saya yang menyatakan

HAFEEZ ABU
NIM.1830307006

BIODATA



Nama : HAFEEZ ABU
NIM : 1830307006
Tempat, Tanggal Lahir : Yala, Thailand/04 September 1999
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Alamat : Yala, Thailand
No HP : 082386571151
Nama Orang Tua
Ayah : Makila Abu
Ibu : Pha-esa Samae
Motto : “jangan menyerah sebelum mencoba”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Assalamu 'alaikum warahmatullahiwabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil alamin,

Sujud serta Syukur tiada hentinya kepada Allah SWT. Nikmat dan pertolongannya telah memberikanku kekuatan, jalan dan kemudahan dalam menjalani setiap episode kehidupan. Atas bantuan dan pertolongannya akhirnya Skripsi yang sederhana ini mampuku selasaiakan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan sebuah karya yang sederhana ini untuk hamba-hamba Allah yang luarbiasa.

Ibunda Dan Ayahanda tercinta

Tiada kata yang bisa kuucapkan terimakasih atas doa dan semangat yang selalu disematkan didalam hatiku aku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk ibunda (Pha-esa Samae) dan ayahanda (Makila Abu). Hadiah ini sebagai tanda bukti dan ucapan terimakasih tiada terhingga untuk kedua orang tua yang paling besar cinta dan doa yang tulus untuk anaknya. Cinta dan kasih sayang sedari dulu yang mendidik, membesarkan dan mengupayakan semua kebaikan dan kebahagiaan yang tidak bisaku balasakan satu persatu terimakasih ayah terimakasih ibu kalian sudah mempercayai anakmu jauh-jauh kuliah dari Patani ke Indonesia banyak halangan dan rintangan yang anakmu tempuh didalam pendidikan ketika ayahanda dan ibunda bertanya aku mengatakan baik-baik saja aku tidak ingin melukiskan raut wajah yang sedih kepada ayah dan ibunda akupun tau ketika aku bertanya tentnag keadaan ayah dan ibu, ayah dan ibu menjawab baik-baik saja akupun tau kata-kata yang di lontarkan padaku agar aku tidak cemas di Indonesia. Teruntuk ayah anak laki-lakinya semoga ayah bangga melihat putra kecilmu, Alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan ditingkat kuliah.

Hamba-hamba Allah yang senantiasa ada.

4 tahun bukan waktu yang cepat yang untuk kulalui, banyak hal yang baru kutemui. Untaian kata ku ucapkan terimakasih kepada dosenku ayahanda Novi Budiman, M. Si yang telah membimbing anak didikmu didalam penyelesaian skripsi ini. banyak hal yang tak kumengerti akhirnya kupahami, banyak hal yang kuragui tetapi kau ajari, dan juga tak terlupa kepada Dosen-dosen yang lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.

Terimakasih juga kepada teman-temanku tanpa kalian cerita ini tidak akan bisa terjadi semanis ini hari-hariku menjadi saksi perjalanan kisah di bangku kuliah, kita sering berdiskusi, kita sering tertawa serta kita sering cemas didalam problem perkuliahan yang kita jalani. kepada teman-teman saya Aqsal Zendra, Ari Jalul Hakam, Al Azhar, Khoiree Yako, Widi Santoso, Rio Febrian, Rolan Syafril Munandar, Rahmat Taufan, Habiburrahman, Metri Hertika, Laura Annisa Fitri, Hafizhatul Husna, Vikcy Aulia Citra, Kukuh Nusantara Haji, Uswatun Hasanah, dan seluruh mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam. Terimakasih teman-teman kalian telah mewarnai kehidupanku selama di Indonesia.

=HAFEEZ ABU=

Batusangkar, 14 Agustus 2022

ABSTRAK

Hafeez Abu 1830307006 (2022) judul skripsi : **“Keterlibatan *Civil Society Assembly For Peace* Dalam Penguatan *Civil Society* Di Selatan Thailand”**.
Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan *Civil Society Assembly for Peace* sebagai salah satu NGO yang terdapat di selatan Thailand dalam rangka Penguatan *Civil society* .

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informen yang dekat dengan objek penelitian sementara data skunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, artikel yang sesuai dengan masalah yang teliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Civil Society Assembly for Peace* (CAP) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penguatan *Civil Society* di selatan Thailand, terdapatnya respon positif masarakat terhadap kehadiran *Civil Society Asseembly for Peace*, namun dari sisi lain pemerintah Thailand masih menganggap *Civil Society Asseembly For Peace* sebagai ancaman hal ini terlihat dari tekanan-tekanan politik yang diberikan oleh pemerintah Thailand terhadap *Civil Society Assembly For Peace* dalam mengembangkan program-programnya di selatan Thailand.

Kata kunci: *Non-government Organization, Civil Society Assembly For Peace, Selatan Thailand*

ABSTRACT

Hafeez Abu 1830307006 (2022) thesis title : "Involvement of the Civil Society Assembly for Peace in Strengthening Civil Society in Southern Thailand". Department of Islamic Political Thought , Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah . 491% This study aims to determine the involvement of the Civil Society Assembly for Peace as one of the NGOs located in southern Thailand in the context of Strengthening Civil society. The research method used in the preparation of this thesis is a descriptive qualitative approach. The primary data in this study were obtained through interviews with several informants who were close to the object of research, while the secondary data was obtained through documents, books, articles that were in accordance with the exact problem. The results of this study indicate that the Civil Society Assembly for Peace (CAP) has a very important and strategic role in strengthening Civil Society in southern Thailand, there is a positive response from the community to the presence of the Civil Society Asseembly for Peace, but from the other side the Thai government still considers Civil Society Asseembly For Peace as a threat can be seen from the political pressures given by the Thai government to the Civil Society Assembly For Peace in developing its programs in southern Thailand.

Keywords: *Non-government Organization, Civil Society Assembly For Peace, Southern Thailand.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'amin, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahNya kepada peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amiin.

Penulisan proposal skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat untuk penulisan skripsi pada Jurusan Pemikiran Politik Islam Insitut Agama Islam Negeri Batusangkar. Selanjutnya, dalam penulisan proposal skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang peneliti terima. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada orang tua tercinta yakni orang tua berkat jasa-jasa, kesabaran, do'anya dan telah berjuang dan berhasil membesarkan dan mendidik penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi, serta saudara tersayang yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang kepada penulis yakni kakak Abag, Kakak, dan Sahabat, Serta orang-orang sekeliling yang telah memberikan semangat yang luar biasa buat saya.

Batusangkar, 27 Juni 2022

Hafeez Abu
NIM. 1830307006

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
BIODATA	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus penelitian.....	5
C. Sub Fokus	6
D. Pertanyaan Penelitian.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat dan Luaran penelitian	7
G. Defenisi Istilah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. <i>Non-Government Organization</i> (NGO)	9
a. Pengertian Non Government Organization (NGO).....	9
b. Karakteristik NGO.....	13
c. Peran Non-Governmental Organization (NGO).....	15
d. Dampak Peran Non-Governmental Organization (NGO) .	16
2. <i>Civil Society</i>	17
a. Pengertian <i>Civil Society</i>	17
b. Unsur-Unsur <i>Civil Society</i>	19

	c. Konsep <i>civil society</i>	20
	d. Budaya <i>Civil Society</i>	22
	e. Ciri-Ciri (<i>Civil Society</i>)	23
	B. Penelitian Relevan	25
	C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III	METODE PENELITIAN	28
	A. Jenis Penelitian.....	28
	B. Latar dan Waktu Penelitian	28
	C. Subjek Penelitian.....	28
	D. Instrument Penelitian	29
	E. Sumber Data.....	29
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
	G. Teknik Analisis dan Interpretasi Data.....	31
	H. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data.....	33
BAB IV	TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
	A. Gambaran Umum <i>Civil Society Assembly For Peace</i> (CAP)	35
	1. Sejarah berdirinya <i>Civil Society Assembly For Peace</i> (CAP) 35	
	2. Tujuan <i>Civil Society Assembly for Peace</i> (CAP)	38
	3. Struktur Organisasi <i>Civil Society Assembly For Peace</i>	41
	4. Keanggotaan <i>Society Assembly for Peace</i> (CAP)	43
	B. Keterlibatan <i>Civil Society Assembly For Peace</i> (CAP) dalam penguatan <i>Civil society</i> di selatan Thailand.....	44
	C. Tantangan <i>Civil society Assembly for Peace</i> dalam Penguatan <i>Civil society</i> di selatan Thailand	67
	D. Respon Masyarakat Patani dan pemerintah Thailand Terhadap <i>Civil society Assembly for Peace</i>	70
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	:	Pemberian Daging Kurban Kepada Anak Yatim.....	46
Gambar 4.2	:	Organisasi Nusantara Mengadakan Acara Pelatihan Anak Yatim Dalam Merubutkan Biasiswa.....	47
Gambar 4.3	:	Para Aktivistis Phos Turun Lapangan Untuk Chek Kesehatan Masyarakat Patani Di Sabayoy Provin Songkhla	47
Gambar 4.4	:	Para Aktivistis Organisasi Public Health Officer For Social Walfare Turun Lapangan Untuk Memberikan Pahaman Tentng Kesehatan Di Sekolah Dasar Agama Kampung Berangae Provinsi Yala	48
Gambar 4.5	:	Para Aktivistis Organisasi Phos Mengangkat Acara Tentang Minta Bantuan Dari Masyarakat Patani Untuk Membantu Warga Negara Malaysia Yang Berpengalami Banjir	48
Gambar 4.6	:	Para Aktivistis Organisasi Ad-Deen Bersama Organisasi Nusantara Dalam Melaksanakan Acara Yang Bernama Membangun Impian Dan Meningkatkan Ketaqwaan Anak Yatim Seluruh Patani.....	49
Gambar: 4.7	:	Para Aktivistis Organisasi Youtnet Mengada Acara Pemberian Makanan Kepada Masyarakat Patani Yang Tertimpa Bajir	49
Gambar 4.8	:	Pemberian Kain Sarung Oleh Organisasi JASAD.....	50
Gambar 4.9	:	Pembekalan Materi Tentang Ham Oleh JASAD	50
Gambar: 4.10	:	Aktivistis Dari Organisasi Jaringan Belia Lembahan Sungai Saiburi Turun Lapangan Untuk Mengadakan Acara Melestarikan Hutan Dengan Konsep Menjaga Sungai Saiburi Di Saiburi Provinsi Patani.....	51
Gambar 4.11	:	Organisasi Jaringan Menggalak Etika Islam Mengadakan Acaran Penyampaian Tentang Menagemen Keluarga Untuk Keharmonisan Atau Kemesraan Dalam Bulan Ramadhan	52

Gambar 4.12	:	Organisasi Jaringan Guru Sekolah Melayu Menuntut Kepada Pemimpin Militer Bahwa Ada Militer Masuk Di Sekolah Didikan Agama Dengan Tidak Di Undang Dan Foto KTP Para-Para Guru.....	53
Gambar 4.13	:	Kunjungan Pecinta Sejarah Patani Kerumah Singgora	53
Gambar 4.14	:	Organisasi Pecinta Sejarah Patani Pemberian Pahaman Kepada Masyarakat Patani Tentang Sejarah Patani	54
Gambar 4.15	:	Aktivis Organisasi <i>Muslim Attorney Centre Foundation</i> (Mac) Mundang Para Ulama Patani Untuk Mencari Solusi Dalam Pengolahan Jinazah Yang Padi Penyakit Covid-19.	54
Gambar 4.16	:	Kunjungan Mahasiswa Patani Ke Hap	55
Gambar 4.17	:	Organisasi Patani Human Rights Organization Mengadakan Acara Mengembangkan Potensi Dan Penilaian Kesehatan Mental Masyarakat Patani Yang Sedang Mengalami Dengan Kondisi Konflik Di Patani.	55
Gambar 4.18	:	Aktivis Organisasi Naringan Intelektual Patani Diskusi Bersama Akvitifis Organisasi Jop, Hap, Psp Dan Sebagainya Tentang Membangun Kegiatan-Kegiatan Demi Kemajuan Patani.....	56
Gambar 4.19	:	Aktivis Organisasi <i>Youth Intergration For Community Empowerment Center</i> Turun Lapangan Untuk Membantu Warga Masyarakat Yang Mengalami Militer Thailand Sering Ke Rumah Mereka	57
Gambar 4.20	:	Aktivis Organisasi <i>Youth Integration For Commurity Empowerment Center</i> Bersama Wartani Dalam Melaksanakan Kegiatan Yang Bernama Warga Negara Untuk Perubahan	57
Gambar 4.21	:	Famplet Diskusi Online Oleh Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam	58
Gambar 4.22	:	Kunjungan Situs Sejarah Patani.....	58
Gambar 4.23	:	Foto Aktivis Organisasi Intelak Cinta Seni Budaya	

	Mengadakan Main Bola Bersama Untuk Mengeratkan Buhungan Diantara Para Aktivis Dalam Organisasinya.....	59
Gambat 4.24	: Aktivis Organisasi Pusat Budaya Melayu Patani Bersama Warga Negara Patani Di Provinsi Yala Dalam Mengadakan Kegiatan Cinta Budaya Melayu.....	60
Gambar 4.25	: Pelatihan Terhadap Guru Yang Di Laksanakan Oleh Bunga Raya Gruop Patani.....	60
Gambar 4.26	: Aktivis Organisasi Persatuan Perempuan Patani Mengadakan Acara Menaggap Kehilangan Seorang Yang Menuntut Keadilan Di Selatan Thailand Beliau Bernama Tnay Somchai.....	61
Gambar 4.27	: Organisasi Persatuan Harimau Patani Mengadakan Acara Tampilan Persembahan Silat Harimai Pantai Patani	61
Gambar 4.28	: Aktivis Organisasi Jaringan Wanita Membela Hak Sasi Patani Turun Lapangan Untuk Mengziarahi Keluarga Pejuang Patani Yang Meninggal Karena Peperangan Dengan Militer Thailand Dengan Berjumlah 6 Orang	62
Gambar 4.29	: Aktivis Organisasi Lembaga Guru Untuk Penelitian Sistem Pendidikan Nusantara Mengadakan Acara Seminar Pendidikan Tentang Ngajar Mengajar Peserta Didik	63
Gambar 4.30	: Aktivis Organisasi Social Develoment Organization Mekukan Pemberian Makanan Kepada Masyarakat Patani Bertimpa Dengan Banjir.....	63
Gambar 4.31	: Aktivis Organisasi Remaja Menentuk Haksasi Manusia Untuk Pengembangan Mengadakan Pemberian Materi Tentang Meningkatkan Kualitas Masyarakat Di Era Globalisasi Sekarang Ini.....	64
Gambar 4.32	: Informasi Pertandingan Membangun Pintu Gerbang Di Setiap Kampung Untuk Menyambut Hari Raya Aidil Fitri	65
Gambar 4.33	: Himpunan Pemuda Seluruh Patani Dengan Berpakaian Baju Melayu	65

Gambar 4.34	:	Himpunan Pemuda Seluruh Patani Dengan Berpakaian Baju Melayu	66
Gambar 4.35	:	Pembagian Makanan Kepada Orang Di Penjara Pada Hari Raya Ke-2 Aidil Adha	66

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1: Kerangka Pemikiran	27
Bagan 4. 1: Struktur Organisasi Cap.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat Patani mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan empat raja, yaitu; Raja Hijau (1584-1616), Ratu Biru (1616-1624), Raja Ungu (1624-1635) dan Raja Kuning (1635-1686). Selama masa raja-raja ini, Patani sangat makmur dan kaya raya. Kekuasaannya juga meluas hingga dikenal sebagai Negara Patani Besar. Dimana kesuksesan ini berlangsung selama 67 tahun. Ketika Raja Kuning meninggal pada tahun 1686, keberhasilan Patani memudar dan terjadi kemunduran politik, ekonomi, dan militer. Negara bagian Patani Besar meliputi; Kelantan, Terangganu, Patani Awal, Senggora dan Pathalung yang tadinya menyatu, mulai terpisah. Bersamaan dengan penurunan ini, Siam bangkit dan berhasil mengusir Burma dari seluruh negeri. Patani ditaklukkan oleh Siam pada tahun 1785. Sejak itu patani berada di bawah kekuasaan Siam (Niaripen 2016:23).

Pada tahun 1909 Patani resmi menjadi bagian dari Siam, kemudian berganti nama menjadi Thailand hingga saat ini. Setelah Patani jatuh ke tangan Siam (Thailand), beberapa masalah muncul di Patani, tampaknya konflik di Thailand selatan adalah konflik yang telah berlangsung sejak abad ke-19 ('Krisis Paknam), dan setelah pembagian perbatasan negara. Selatan Thailand (Patani, Yala, Narathiwat dan Satun) menjadi kekuatan Kerajaan Thailand di bawah sanksi Inggris (Niaripen 2016:25).

Karena Kerajaan Siam sepenuhnya menguasai wilayah selatan, strategi utamanya adalah melindungi dan melestarikan wilayah tersebut sebagai tanah taklukan (Capakiya 2002:19). Karena faktor sejarah ini, nasionalisme Melayu-Muslim telah didorong selama ratusan tahun. Nasionalisme Melayu-Muslim adalah nasionalisme reaksioner yang lahir dari ketakutan akan kehilangan identitas sebagai komunitas Muslim (Jehma Rosana, Sumardi 2017:34).

Pada tahun 2004, sebuah manifesto politik memicu era "Perang Revolusi Patani" gerilya, yang melihat kebangkitan oposisi Patani terhadap

pemerintah pusat Thailand, yang telah terjadi pada periode sebelumnya adalah bentuk protes skala kecil. Akibat konflik yang berlarut-larut di wilayah tersebut, bukan hanya karena perbedaan kepentingan yang masing-masing memiliki ideologi nasionalis tertentu, yaitu nasionalisme Siam-Thailand dan nasionalisme Melayu-Patani, tetapi juga mengakar kuat pada faktor-faktor terkait manajemen. Struktur manajemen kekuasaan dari sudut pandang undang-undang dan kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang tidak sesuai dengan identitas dan cara hidup masyarakat melayu dan menghambat partisipasi langsung masyarakat melayu sampai pada tingkat yang menciptakan rasa kepemilikan dan kesetaraan yang nyata. Selain itu, merupakan unsur yang berkaitan dengan sejarah pendudukan akibat Perjanjian Bangkok (*Treaty of Bangkok* tahun 1909) yang disahkan oleh dua kekuatan kolonial asing, yaitu Kerajaan Siam-Inggris (Anglo-Siam) 10 Maret 1909 (A. Malek 1993:19).

Konflik antara Patani semakin memanas ketika tragedi berdarah Krisek (Krue Se) dan TakBai menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat global. Menurut Farid Mat Zain dalam kajiannya "*Muslims of Southern Thailand: Conflict and Struggle*" tentang peristiwa berdarah tersebut, ia menyimpulkan tiga pendapat umum tentang peristiwa tersebut. Pertama, kepergian Krisek dan TakBai yang tragis dipandang sebagai titik awal kebangkitan baru Muslim Melayu di Patani yang telah mundur jauh sebelumnya. Kedua, insiden tersebut juga dilihat sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah pusat Thailand dan ketiga, terutama terhadap mereka yang telah mengaitkan tragedi tersebut dengan serangkaian kejahatan terkait jaringan terorisme global (Nur 2017:18).

Hingga tahun 2007 merupakan peristiwa yang menandai sejarah baru bagi komunitas Muslim Melayu di Patani di tengah krisis konflik dan kekerasan yang berlangsung sejak tahun 2004. Peristiwa tersebut merupakan salah satu peristiwa penting yang memiliki pengaruh menentukan nasib kudeta di Patani. Semangat perubahan ini menjadi awal kebangkitan pemuda dan masyarakat madani, yang diawali oleh kelompok mahasiswa dan mahasiswi

garda terdepan yang memimpin aksi tunjuk rasa di Masjid Jamek Patani. Pada saat itu berkumpul para intelektual, cendekiawan, dan pemerhati konflik, yang secara aktif menjalankan tanggung jawab mereka kepada masyarakat untuk menuntut keadilan dan bekerja untuk menghapuskan undang-undang darurat militer di wilayah konflik. Jumlah pengunjuk rasa saat itu mencapai 10.000 orang, dari berbagai kalangan hadir dengan tujuan memprotes pemerintah pusat Thailand. Hal ini karena represi militer sebelumnya merupakan tindakan keras kepada ruang sipil atau melalui aparat dalam pelanggaran HAM masa lalu yang tanpa kompromi, reaksioner dan tidak terselesaikan.

Demonstrasi terbesar ini dianggap merupakan titik perubahan dalam perkembangannya terbuka ruang bagi rakyat partisipasi dalam berpolitik, sebagai keinginan menuntut hak kebebasan dan keadilan oleh rakyat untuk rakyat. Namun bukanlah hanya peranan sebagai menekankan pemerintahan pusat Thailand menuntut perubahan sikapnya saja tetapi seharusnya menjadi suara bagi rakyat yang belum mencerminkan kebenaran dengan sendiri, sehingga masyarakat publik tidak akan menjadi alat yang sah dalam mengintimidasi rakyat yang mendukung posisi negara yang menerima informasi tidak berdasarkan fakta. Sehingga sikap kritis para intelektual itu sering dituduh oleh aparat keamanan sebagai kelompok yang mengambil jarak dengan gerakan separatis.

Dari periode inilah masyarakat sipil mulai menyadari bahwa diskriminasi telah berlangsung sejak lama, yang dampaknya banyak warga menjadi korban utama konflik dan kekerasan. Sehingga keberadaan *civil society Assembly for peace* yang sedang berkembang di Patani, tentunya memiliki banyak implikasi bagi masyarakat dan pemerintah. Hingga semakin banyak anggota masyarakat sipil yang muncul untuk menerima dan berpartisipasi dalam membantu korban luka berat akibat kekerasan yang terus menerus dalam konflik bersenjata. Beberapa organisasi memiliki visi dan misi untuk membantu saat dibutuhkan, seperti pemulihan keuangan, kesehatan mental, bantuan hukum (Tuwaemaengae 2013:5).

Kendati demikian, dalam situasi dan kondisi konflik yang telah

berlangsung dari satu dekade dengan tanpa titik temu untuk berakhir. Walaupun negosiasi politik melalui proses dialog perdamaian (*peace dialogue process*) antara pemerintah pusat Thailand dengan faksi gerakan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) pada 28 Februari 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia ketika Ustadz Hasan Taib berjabat tangan dengan Paradorn Pattanathabut selaku sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional atau *National Security Council* (NSC) pada masa perdana menteri Yingluck Shinawatra, yang memimpin tim negosiasi Thailand.

Pertemuan mereka memicu harapan melahirkan perdamaian tetapi sering beberapa kali namun tidak begitu nampaknya resolusi yang paling terbaik dalam menyelesaikan masalah konflik, karena kondisi pemerintahan Pusat Thailand di Bangkok sedang melanda krisis politik internal sehingga muncul kudeta Thailand pada 2014 pemerintah diktator militer merampas kekuasaan kembali. Justru dampak dari konflik dan kekerasan dengan operasi bersenjata semakin kuat sehingga belakangan ini dapat mengurangi dan menghindari sasaran mangsa terkorban bukan kelompok sesama angkatan bersenjata, akan tetapi rasa ketakutan bagi penduduk di zona konflik dan seluruh warga negara masih berharap untuk berhenti segala operasi kekerasan dan aktivitas bersenjata yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan harus mengembalikan ke meja dialog untuk mendapatkan kontrak yang bersepakat sehingga terus mengembalikan hak-hak mereka dengan kesejahteraan bagi warga setempat dengan membangun proses perdamaian yang hakiki (Mamang. 2017:3).

Namun, setahun kemudian, proses dialog perdamaian di Selatan Thailand membuka babak baru dengan organisasi payung yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Patani atau Majelis Syura Patani (MARA Patani). Organisasi ini terdiri dari beberapa fraksi yang berperang, di antaranya Organisasi Persatuan Pembebasan Patani atau *Patani United Liberation Organization* (PULO), Organisasi Pembebasan Islam Patani (BIPP), Gerakan Islam Mujahidin Patani (GMIP). Namun sejauh ini, arahnya belum jelas. Yang muncul hanyalah istilah "multikultural" dan "zona aman"

dalam konteks realitas konflik dan kekerasan senjata yang masih semrawut antara angkatan bersenjata Thailand dan pemimpin faksi unifikasi gerakan pembebasan di Selatan Thailand, khususnya BRN.

Perdamaian di Patani tidak hanya kepentingan politik pihak yang bertikai, akan tetapi proses perdamaian di Patani harus melibatkan partisipasi berbagai pihak seperti *civil society organizations* (CSOs), akademisi, tokoh agama., dan pemerintah. Sementara itu, disisi lain masyarakat juga diberi ruang untuk berpartisipasi menawarkan solusi bagi perdamaian. Proses perdamaian diuntungkan dengan adanya ruang politik yang terbuka bagi masyarakat untuk mengekspresikan pikiran dan kebutuhannya tanpa intimidasi. Karena tujuan dari perdamaian adalah untuk mencerminkan maksud pemecahan masalah dari kebutuhan primer masyarakat setempat. Oleh karena itu, proses perdamaian yang sebenarnya harus menghormati prinsip bahwa yang tertinggi adalah prioritasnya untuk kebaikan rakyat, berdasarkan nilai-nilai budaya Patani yang mendasar.

Dalam situasi konflik keterlibatan *Non Government Organisation* (NGO) memiliki peran penting untuk mewujudkan perdamaian dan melakukan advokasi terhadap masyarakat yang terdampak konflik. Salah satu NGO yang concreat dalam beberapa tahun belakangan ini terhadap konflik yang terjadi di selatan Thailand adalah *Civil society Assembly For Peace*. Organisasi ini merupakan organisasi payung yang bertujuan Untuk menciptakan perdamaian dan menyatukan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di selatan Thailand.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji keterlibatan *Civil society Assembly For Peace* dalam penguatan *Civi Society* di selatan Thailand

B. Fokus penelitian

Supaya lebih terarah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menfokuskan permasalahan penelitian ini pada keterlibatan *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) dalam Penguatan *Civil Society* di selatan Thailand.

C. Sub Fokus

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Keterlibatan *Civil Society Assembly For Peace* dalam Penguatan *Civil Society* di Selatan Thailand.
2. Tantangan *Civil Society Assembly For Peace* dalam Penguatan *Civil Society* di Selatan Thailand.
3. Respon masyarakat Patani dan pemerintah Thailand terhadap kehadiran NGO *Civil Society Assembly For Peace*

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan Penelitian merupakan suatu rumusan atau proses mempersoalkan dalam sebuah peristiwa adapun tingkah laku kejadian, baik dalam kedudukannya sebagai kejadian mandiri, maupun dalam konteks yang saling terkait dengan kejadian lainnya, baik sebagai penyebab maupun akibat, maka hal tersebut perlu diproseskan. Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana keterlibatan *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) dalam Penguatan *Civil Society* di Selatan Thailand?
2. Bagaimana tantangan *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) dalam Penguatan *Civil Society* di selatan Thailand?
3. Bagaimana respon masyarakat Patani dan pemerintah Thailand terhadap kehadiran *Civil Society Assembly For Peace* (CAP)?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini merupakan suatu pengembangan untuk mendapat sebuah hasil serta memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penulisan sehingga nantinya diharapkan adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana keterlibatan *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) dalam Penguatan *Civil Society* di Selatan Thailand.
2. Untuk mengetahui tantangan *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) dalam

Penguatan *Civil Society* di selatan Thailand?

3. Untuk mengetahui respon masyarakat Patani dan pemerintah Thailand terhadap kehadiran *Civil Society Assembly For Peace (CAP)*?

F. Manfaat dan Luaran penelitian

Adapun manfaat dan luaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan faedah kepada berbagai pihak, baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya, atau mereka yang membutuhkan pengetahuan tentang “Keterlibatan *Civil society Assembly For Peace (CAP)* Dalam Penguatan *Civil society* di Selatan Thailand” Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan ilmu pengetahuan dan juga bermanfaat di waktu yang akan datang sehingga hasil penelitian ini menjadi pedoman

b. Manfaat secara Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mewawancarai tentang Keterlibatan *Civil society Assembly For Peace* dalam Penguatan *Civil society* di Selatan Thailand.

c. Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai objek ini dalam perspektif yang lainnya dan selanjutnya hallian penelitian ini akan dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmu sosial dan politik yang terakreditasi.

G. Defenisi Istilah

Agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah penting penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. *Non-Government Organization* (NGO)

Non-Government Organization merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh kalangan masyarakat yang bersifat independent dan terorganisis yang tidak dapat di intervensi oleh kepentingan dan kekuatan apapun yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

2. *Civil society Assembly For Peace* (CAP)

Civil society Assembly For Peace (CAP) merupakan salah satu *Non-Government Organization* yang dibentuk oleh masyarakat dan mahasiswa selatan Thailand yang bertujuan untuk memberikan advokasi dan mencari perdamaian terhadap masyarakat minoritas Muslim Patani di Selatan Thailand.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. *Non-Government Organization* (NGO)

a. Pengertian Non Government Organization (NGO)

Non Government Organization (NGO) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah (Bahasa Inggris: *Non Governmental Organization*; NGO). Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sebagai berikut: Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi.

Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di indonesia berbentuk yayasan. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, NGO diharapkan dapat mendorong perubahan sosial melalui pemberdayaan politik (*community empowering*), penguatan arus bawah dan peningkatan pendapatan ekonomi. Kinerja NGO ditandai dengan perubahan sosial, di mana mandat NGO adalah menciptakan kesadaran masyarakat sipil. Perubahan difokuskan kepada masyarakat, sebagai pelaku perubahan melalui penataan organisasi dan metodologi secara bersama. Sebagai contoh, timbulnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam setiap

proses pengambilan keputusan daerah merupakan hal yang sangat penting. Keberadaan NGO ditandai dengan intensitas interaksi antar anggota NGO dengan anggota masyarakat secara langsung. Lembaga fungsional (NGO) ini memediasi atau menjembatani jarak antara masyarakat dengan struktur negara (di daerah), tetapi dengan catatan, tidak larut dalam mainstream negara.

Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah yang ada dapat di kategorikan sebagai berikut:

- a) Organisasi donor adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
- b) Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
- c) Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dan lainnya.
- d) Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

Lembaga swadaya masyarakat secara hukum dapat didirikan dalam dua bentuk sebagai berikut:

- a) Organisasi Massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ("UU Ormas").
- b) Badan Hukum, yakni berdasarkan Staatsblad 1870 No. 64, serta UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana

telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 ("UU Yayasan").
(Syamsul Bahar: 2014).

Dalam pandangan *Antonio Gramsci*, tidak mungkin untuk memahami negara dan masyarakat sipil sebagai entitas yang sepenuhnya independen dan terpisah. Masyarakat sipil pada dasarnya terdiri dari sekumpulan organisasi dan institusi, tetapi tidak terbatas pada mereka. Masyarakat madani dapat dipahami sebagai "ruang" hubungan sosial yang dimediasi antara individu dan negara (Ginanja 2020:75).

Definisi seperti itu sering dikaitkan dengan fungsi dan keberadaan masyarakat sipil sebagai struktur yang sama sekali tidak setara, terdiri dari berbagai organisasi, dan gerakan sosial, mencerminkan disparitas, dan dalam banyak hal, jika kita merujuk pada sudut pandang *Gramsci*, ada kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Negara (Ginanja 2020:75).

Sebagai bagian dari sistem tata kelola dunia, NGO, gerakan sosial, organisasi bisnis, forum penelitian, dan asosiasi masyarakat sipil lainnya terlibat dalam perbaikan tata kelola dunia dalam banyak hal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada banyak bentuk keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam meningkatkan tata kelola dunia. Bentuk partisipasi eksklusif kelompok masyarakat sipil dapat dalam bentuk kredit, keanggotaan delegasi pemerintah, konsultan politik, posisi di komite dan dewan resmi, evaluasi, dan lainnya. Harga dan memperbarui peraturan dunia mereka sendiri. Dengan partisipasi individu, kelompok masyarakat sipil berusaha menciptakan forum untuk pemerintahan dunia melalui sektor-sektor alternatif seperti pemerintah nasional, partai politik, dan media. Pada isu-isu lain, kelompok masyarakat sipil yang terkait dengan pemerintah dunia secara terbuka menentangnya melalui protes jalanan dan bentuk oposisi lainnya.

David Lewis mendefinisikan sebuah NGO sebagai sebuah “*voluntary associations*” yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik.⁹ Kampanye yang dilakukan oleh setiap NGO saat ini biasanya akan berorientasi pada masalah yang paling menjadi polemik dan sangat kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya berbagai bentuk kampanye dalam pembangunan demokrasi, penyelesaian konflik, penegakan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. (David Lewis Dan Paul Opoku-Mensah: 2006: 665).

Kerstin Martens mendefinisikan NGO sebagai sebuah organisasi warga yang independen serta formal (*profesional*) serta memiliki tujuan utama untuk mencapai tujuan bersama di taraf nasional atau internasional *Sir Geoffrey Wilson*, selaku salah satu petinggi *Oxfam* di Inggris di tahun 1981, mengungkapkan bahwa sebagian besar NGO memiliki kepedulian terhadap pembangunan serta perkembangan di isu agrikultur, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. berdasarkan *Sir Geoffrey Wilson*, sebagian akbar NGO dikelola serta dijalankan oleh orang-orang yang ahli terhadap bidang eksklusif (Cheng, 2004: 5).

Pada tahun 1944, perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan NGO menjadi sebuah entitas non profit yang beranggotakan masyarakat sipil atau asosiasi rakyat sipil dari suatu negara atau lebih, pada mana aktivitasnya dipengaruhi sang kebutuhan kolektif anggotanya atau kawan kerjasamanya (Cheng, 2004, hal. 6). istilah NGO kemudian secara resmi diakui semenjak pelaksanaan *United Nations Conference on International Organization* pada *San Fransisco* pada tahun 1945. terdapat 1.200 organisasi warga yang hadir dan turut membantu lahirnya *United Nations Charter* (Piagam PBB). peran NGO di dunia internasional lalu tertuang di Pasal 71 berasal Piagam PBB yg menyatakan bahwa Dewan Ekonomi dan Sosial PBB bisa melakukan konsultasi menggunakan NGO yang

mempunyai kompetensi yang sesuai dengan suatu berita tertentu (Cheng, 2004: 6).

Dalam perspektif hubungan internasional. Definisi NGO dapat dilihat dalam berbagai perspektif. Kaum liberalism mengatakan bahwa menjadi keliru Ketika NGO sebagai aktor dalam hubungan internasional diasumsikan dapat menjadi ancaman yang bisa menghadirkan berbagai tekanan. Di sisi lain, perspektif realisme berfokus di negara yang mempunyai kiprah utama menjadi aktor dalam hubungan internasional. Tetapi, negara artinya aktor primer yang memiliki peran terpenting pada hubungan internasional dengan segala wewenang yang dimilikinya. Teori rezim pada hubungan internasional memandang NGO menjadi keliru satu aktor non negara yang dapat mendorong hadirnya bentuk- bentuk baru pada rezim internasional sebab NGO menganut tujuan serta nilai-nilai tertentu (Ahmed & Potter, 2006: 11).

b. Karakteristik NGO

Untuk mengatasi masalah global, seperti perdagangan anak, semua pihak memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam memecahkan atau memunculkan ide-ide yang berbeda untuk mengurangi masalah tersebut. Peran pemerintah saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Kompleksitas hubungan internasional saat ini juga telah meningkatkan peran aktor non-negara yang juga dapat berpartisipasi dalam mengatasi fenomena ini. Hubungan internasional yang berlangsung dewasa ini dipengaruhi oleh partisipasi individu dalam kelompok organisasi internasional. Masing-masing mata pelajaran dalam hubungan internasional ini saling berkaitan satu sama lain. Hal ini menciptakan berbagai macam hubungan, seperti transnasional, trans-pemerintah, hingga bentuk-bentuk hubungan antar pemerintah lainnya. Semua hubungan ini sekarang dianggap hubungan internasional.

David Lewis mendefinisikan NGO sebagai "asosiasi sukarela" yang peduli dengan perubahan lingkungan tertentu menjadi lebih baik. Kampanye yang dilakukan oleh setiap NGO saat ini umumnya diarahkan pada masalah kehidupan sosial manusia yang paling kompleks dan kontroversial. Misalnya, berbagai bentuk advokasi pembangunan demokrasi, resolusi konflik, penegakan hak asasi manusia, dan lain-lain. Pembangunan Internasional, Sejauh ini, NGO telah berkembang sangat cepat dan kuat. Kelompok nirlaba ini bahkan dapat menjalin kemitraan dengan berbagai kelompok.

NGO ini adalah organisasi dengan sistem keanggotaan yang tidak berhubungan dengan negara, tetapi melibatkan setidaknya dua kelompok tertentu dari negara yang berbeda, tetapi dengan keinginan dan tujuan yang sama (Clive Archer 2001: 38).

Setiap NGO memiliki beberapa fungsi penting dalam hubungan internasional, seperti bertindak sebagai badan bersama dan agregasi dalam visi sebuah isu internasional. Melalui fitur ini, sebuah NGO dapat mengangkat masalah dalam konteks internasional dan kemudian mencari solusi untuk masalah tersebut. Selain itu, badan-badan lembaga swadaya masyarakat pada saat ini juga mempengaruhi norma-norma pembangunan dalam rangka hubungan internasional. Dibandingkan dengan organisasi pemerintah internasional, NGO adalah organisasi yang tidak memiliki aset yang cukup, tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem sosialisasi di masyarakat. NGO umumnya memiliki kapasitas lebih untuk menjangkau masyarakat sehingga masyarakat terkait dapat menerima ide-ide organisasi.

Suatu organisasi dapat dikualifikasikan sebagai *international non-government organization* (INGO) jika memenuhi syarat penting tertentu, yaitu tidak melibatkan pemerintah negara yang bersangkutan, memiliki tujuan global atau melibatkan berbagai hubungan internasional, memiliki keterbukaan sifat keanggotaan baik dalam

merekrut dan membangun hubungan kolaboratif dengan kelompok dan organisasi lain, memiliki sistem kepemimpinan yang dirancang secara berkala, serta dana mobilitas organisasi berasal dari minimal tiga negara. (David S. McLellan: 1977: 6).

c. Peran Non-Governmental Organization (NGO)

1. Peran NGO juga merupakan pengembangan aspek kehidupan sosial sesuai dengan konteks sasaran dan dimensi sosialnya, NGO berperan penting dalam membentuk perkembangan kehidupan masyarakat dalam hal-hal tertentu dan ini semua tentunya untuk kemajuan masyarakat, sehingga dapat tumbuh dan tetap terdepan.

2. Mendorong Munculnya Inovasi Berkelanjutan

NGO berperan dalam merencanakan berbagai kegiatan inovatif untuk mendukung kemajuan pada aspek-aspek tertentu. Mengingat luasnya jenis, tujuan dan keberadaan NGO, tidak heran jika adopsi berbagai inovasi berkelanjutan dapat segera diterapkan di masyarakat.

3. Aspirator

NGO berperan sebagai aspirator atau perantara penyampai pesan antara masyarakat dengan pemerintah. Berbagai keluhan dan persoalan di bidang sosial dapat diangkat dan diungkapkan melalui peran strategis NGO, sehingga lebih cepat didengar oleh pemerintah.

4. Sebagai Perwakilan Kelompok Masyarakat Tertentu

NGO berperan pula sebagai perwakilan dan menjelma sebagai garda depan yang mewakili masyarakat dalam memengaruhi berbagai kebijakan serta program milik pemerintah. Jadi, bisa dikatakan jika NGO berperan sebagai advokator dalam memfasilitasi masyarakat kelompok tertentu untuk menyuarakan berbagai agenda atau kepentingan, sehingga tujuannya dapat tercapai dan terpenuhi. (Umar)

d. Dampak Peran Non-Governmental Organization (NGO)

Dari peran yang dilakukan NGO tersebut membawa peran yang positif. Berikut merupakan dampak dari positif dari keberadaan NGO (Ismawan, 2003):

a. Dampak Sosial

Melalui pengetahuan (*knowledge*) yang diberikan oleh NGO kepada masyarakat, diharapkan wawasan pemikiran masyarakat semakin meningkat sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memikirkan banyak alternatif dalam usaha mencukupi kebutuhan hidup. Peningkatan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat dapat melalui dua jalur, yaitu jalur langsung dan tidak langsung. Peningkatan pengetahuan secara langsung terjadi apabila masyarakat mendapatkan penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan sebagainya. Sedangkan peningkatan pengetahuan secara tidak langsung terjadi sejalan dengan terintegrasinya masyarakat dalam suatu kelompok swadaya. Melalui peran yang dilakukan NGO, intervensi pembinaan dapat membantu pemecahan permasalahan sosial yang terdapat dalam kelompok. Akibatnya penanganan masalah tersebut dapat dilakukan secara tepat sasaran dan lebih tuntas. Di samping itu, interaksi yang intensif dapat menyebabkan terjadinya proses transformasi sosial.

b. Dampak Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, intervensi pembinaan mampu mendorong masyarakat untuk melakukan pemupukan modal. Selama ini faktor tidak berhasilnya masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya adalah masyarakat tidak mampu melakukan pemupukan modal yang dapat digunakan sebagai pengembangan usaha. Dengan sistem kelompok, modal yang kecil dari setiap masyarakat dapat dikembangkan dan dapat dipergunakan sebagai modal usaha. Di samping itu, dengan adanya modal yang terkumpul dapat mengundang partisipasi dana yang lebih besar dari pihak

ketiga. Kemampuan permodalan kelompok yang semakin bertambah memberikan peluang semakin besar untuk mengembangkan usaha produktif.

c. Dampak Kemasyarakatan

Proses interaksi di dalam kelompok semakin meningkatkan wawasan pemikiran. Adanya kelompok sebagai wadah aktualisasi masyarakat menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Kesadaran untuk turut berperan aktif dalam kegiatan kelompok mempunyai dampak lebih lanjut, yaitu adanya kesediaan masyarakat atau kelompok untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang ditawarkan pemerintah. Proses pengembangan kemandirian dan kesadaran berpartisipasi telah menjembatani kesenjangan sosial di tingkat lokal. Dengan menyempitnya kesenjangan sosial berarti stabilitas sosial politik pun dapat terus berlanjut (Rizky, Muhammad Muktiali: 2013: 157-174).

2. *Civil Society*

a. Pengertian *Civil Society*

Masyarakat madani (*Civil Society*) adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering di perbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari *civil society* sendiri bermacam-macam dan bervariasi. *Civil society* dalam bahasa Indonesia mengandung banyak istilah dimana istilah yang satu dengan lainnya hampir sama. Istilah-istilah tersebut dicetuskan oleh orang-orang yang berbeda seperti Masyarakat Sipil (Mansour Fakih), Masyarakat Kewargaan (Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid), Masyarakat Madani (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M. Dawam Rahardjo). (Mochamad Parmudi: 2015: 29).

Sedangkan dalam bahasa asing, *civil society* disebutkan ke dalam beberapa istilah seperti *Koinonia Politik (Aristoteles)*, *Societas Civilis*

(Cicero), *Comonitas Politica*, dan *Societe Civile* (Tocquivile), *Civitas Etat* (*Adam Ferguson*). Konsep *civil society* ini merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Konsep masyarakat madani atau *civil society* ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat. (Suwarni: 2011: 29).

Yakni muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat *feodal* menuju masyarakat *modern*. Masyarakat Sipil merupakan terjemahan dari istilah *Inggris Civil Society* yang mengambil dari bahasa Latin *civilis societas*. Secara historis karya *Adam Ferguson* merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani.

Makna lain bagi istilah *civil society* yaitu adanya penekanan pada ruang (*space*) yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Di dalam ruang tersebut masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu ada juga yang memahami *civil society* sebagai sebuah asosiasi masyarakat yang beradab dan sukarela hidup dalam suatu tatanan sosial dimana terjadi mobilitas yang tinggi dan kerja sama antar seluruh elemen masyarakat (Suryanto: 2018:125).

Mun'im (1994) mengungkapkan bahwa istilah *civil society* atau masyarakat madani adalah sebuah gagasan eris yang mengejawantah di berbagai tatanan sosial. Dimana hal terpenting dari gagasan tersebut adalah usaha yang dalam menyelaraskan berbagai konflik kepentingan. Entah itu kepentingan masyarakat, individu, dan juga negara. Sedangkan Hefner mengungkapkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Selain itu, masyarakat madani biasanya lebih heterogen. Dalam kondisi tersebut, mereka diharapkan bisa mengorganisasi dirinya sendiri serta bisa menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan peradaban. Dengan

begitu, mereka pada akhirnya mampu berpartisipasi dan mengatasi kondisi global yang cukup kompleks dan juga penuh dengan persaingan.

Munawir (1997) Menurutnya, masyarakat madani itu berasal dari Bahasa Arab. Kata Madani berasal dari kata madana yang artinya mendiami, membangun, atau tinggal. Namun berubah lagi menjadi madaniy yang berarti orang kota, beradab, dan orang sipil. Dengan begitu, bisa kita simpulkan bahwa kata madani dalam Bahasa Arab memiliki banyak arti. Sedangkan konsep madani menurut Majid (1997) seringkali dipandang sebagai masyarakat yang sudah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan serta menentang pihak pemerintah yang sewenang-wenang di Negara Eropa Selatan, Amerika Latin, dan juga Eropa Timur. Kemudian Hall (1998) mengatakan bahwa masyarakat madani biasanya identik dengan istilah *civil society*. Dimana hal tersebut berarti sebuah ide, bayangan, angan-angan, serta cita-cita suatu komunitas yang bisa mengejawantahkan kehidupan sosial. Di dalam masyarakat madani, para anggotanya akan berpegang teguh pada kemanusiaan dan juga peradaban. (Laeli Nur Azizah: 2012).

b. Unsur-Unsur *Civil Society*

Suatu masyarakat madani tidak muncul begitu saja, terdapat berbagai unsur sosial yang menjadi syarat terwujudnya suatu tatanan *civil society*. Adapun beberapa unsur masyarakat madani adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Publik yang Luas

Wilayah publik ini merupakan sarana untuk menyampaikan pendapat para warga masyarakat dimana semua warga mempunyai hak dan posisi yang sama untuk melakukan transaksi politik dan sosial tanpa adanya ancaman dari luar.

2. Adanya Demokrasi

Demokrasi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar keberadaan masyarakat sipil yang murni dapat terbentuk. Demokrasi merupakan suatu sistem sosial politik yang bersumber dan dilaksanakan oleh warga negara serta untuk seluruh masyarakat.

3. Adanya Toleransi

Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau antar kelompok di dalam masyarakat dimana tujuannya untuk menghindari terjadinya diskriminasi.

4. Adanya Pluralisme

Pluralisme merupakan pengakuan dan penerimaan masyarakat akan adanya kemajemukan atau keberagaman di lingkungannya. Sikap tersebut juga disertai dengan sikap yang tulus dalam menerima perbedaan sebagai sesuatu yang alami dan bernilai positif.

5. Adanya Keadilan Sosial

Dalam hal ini keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti; ekonomi, politik, kesempatan, dan ilmu pengetahuan (Administrator 2019).

c. Konsep *civil society*

Sebuah konsep, *civil society* berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Demi kesejahteraan bangsa yang demokratis dan maju. Keberadaan *Civil Society* di sini diartikan sebagai ruang-ruang kehidupan sosial yang terorganisir dengan ciri kesukarelaan, kemandirian, otonomi dan kemandirian dari negara. Negara dan masyarakat sipil kemudian dipahami sebagai dua entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat dari klarifikasi dan modernisasi,

menghadapi masalah dunia, yang keduanya berkontribusi pada pergeseran rezim absolut.

Civil society menjadi penting jika dapat menjadi benteng melawan intervensi negara yang beroperasi secara berlebihan melalui asosiasi, organisasi, dan pembagian bebas orang dan keberadaan ruang publik yang bebas. Melalui kelompok-kelompok independen inilah orang dapat memperkuat posisinya terhadap negara dan membuat kesepakatan wacana satu sama lain. Sedangkan melalui ruang publik yang bebas, rakyat sebagai warga negara, individu dan kelompok yang memiliki kekuasaan, dapat melakukan pengawasan dan kontrol terhadap negara. Sedangkan forum diskusi gratis diisi oleh ulama, mahasiswa, pemuka agama, dan lainnya. juga berperan sebagai pengontrol.

Kiprah negara. 18 *Civil Society* yang memiliki nilai-nilai moral tertentu akan mampu memperkuat masyarakat dan masyarakat terhadap gempuran sistem ekonomi pasar. Nilai-nilai tersebut adalah keramahan, kepercayaan, tanggung jawab, toleransi, kesetaraan, kemandirian, dan lainnya. Misalnya, dengan semakin kokohnya nilai kepercayaan dan tanggungjawab publik, maka sikap *rakus* individualisme yang coba dikembangkan oleh sistem ekonomi pasar melalui konsumerisme dapat dibendung. Dengan memperkuat nilai-nilai toleransi dan kesetaraan, akan dimungkinkan untuk mengontrol keinginan untuk mengeksploitasi yang menjadi motor penggerak kapitalisme (Agus Widjojo. 1999:4).

Kehadiran *Civil Society* dalam masyarakat modern tentunya tidak terlepas dari keberadaan unsur kultural dan struktural yang melekat padanya. Faktor pertama meliputi pembentukan negara berdaulat, perkembangan ekonomi pasar, ketersediaan ruang publik yang bebas, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah, serta adanya organisasi kepentingan publik. Pada saat yang sama, *Civil Society* akan tumbuh dan menguat jika unsur-unsur budaya yang mendasarinya juga kuat.

Faktor-faktor tersebut adalah pengakuan hak asasi manusia dan perlindungannya, terutama hak untuk mengekspresikan diri dan berorganisasi, toleransi antar individu dan kelompok dalam populasi, tingkat kepercayaan yang tinggi oleh publik (kepercayaan publik) terhadap institusi. (Agus Widjojo. 1999:4)

Dalam pandangan A.SHIkam, *civil society* merupakan wacana yang berasal dari Barat dan lebih mendekati esensinya jika masih dinyatakan dalam bentuk aslinya tanpa diterjemahkan ke dalam istilah lain atau masih berpedoman pada konsep '*Tocquville*'. Ruang sosial yang terorganisir memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Sukarela (*voluntary*), keswadayaan, swasembada, serta kemandirian yang tinggi dalam hubungannya dengan Negara dan hubungannya dengan norma atau nilai, aturan hukum yang dianut warga negara. Jadi, masyarakat madani menurut A.SHIkam, adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan penghormatan terhadap negara dan keterikatan pada norma dan nilai hukum yang dianut oleh warga negara. (Muhammad ASHIkam: 1996: hal-3).

Civil Society yang dikenal sebagai masyarakat madani yang digagas oleh para pionir, memiliki tiga ciri utama: adanya tingkat kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat, terutama bagi individu dan kelompok dalam masyarakat. negara, adanya ruang publik yang bebas (*free public sector*) sebagai wahana partisipasi politik aktif warga negara melalui wacana dan praktik yang terkait dengan kepentingan publik. Adanya kemampuan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak ikut campur. (Sufyanto, 2001: 113-115)

d. Budaya *Civil Society*

Budaya (*culture*) memiliki makna yang beraneka-ragam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan oleh pakar yang bersangkutan. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para

pakar dapat ditarik kesimpulan, bahwa budaya merupakan nilai, keyakinan, aturan, dan lain sejenisnya yang menjadi acuan oleh individu-individu di dalamnya untuk mewujudkan perilaku sesuai dengan lingkungannya. Budaya dapat dikatakan sebagai mekanisme kontrol yang menstimulir dan mengendalikan individu dalam mewujudkan tingkah lakunya. Dilihat dari sudut fungsinya budaya dapat dipandang sebagai pembentuk identitas diri dan perekat (*glue*), dan sebagai pengendali sosial (*social control*) terhadap tindakan individu-individu di dalamnya. Di dalam budaya suatu masyarakat mendukung orientasi nilai masing-masing yang menjadi pedoman atau acuan bagi warganya dalam mewujudkan perilaku sehari-hari. Lalu, nilai apa yang sesuai dengan konsepsi *civil society*, terutama dalam konteks kepentingan penyebarluasannya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

e. Ciri-Ciri (*Civil Society*)

Secara umum ciri-ciri yang dimiliki oleh *civil society* yaitu seperti hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum serta terbuka dan transparan. Dari keseluruhan ciri-ciri tersebut, setidaknya terdapat lima point penting dalam *civil society*, yaitu sebagai berikut :

- a) Partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri.
- b) Otonom. Masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya

sendiri, selalu mengembangkan daya kreatifitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku.

- c) Tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebajikan dan menghasilkan dampak positif yang dirinya (masyarakat) secara umum.
- d) Menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih yang positif. Masyarakat madani harus meletakkan permasalahan di atas perbedaan sehingga tidak ditemui pertikaian antar kelompok yang berbau SARA.
- e) Terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat.

Adapun ciri dari masyarakat sipil sebagai sebuah komunitas yaitu selalu memosisikan dirinya di atas keluarga dan dibawah negara. Bentuk lain dari masyarakat sipil dapat kita lihat ke dalam kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang disebut dengan organisasi masyarakat sipil (ormas) atau juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Organisasi-organisasi tersebut memiliki ciri antara lain : mandiri dalam hal pendanaan (tidak bergantung kepada negara), swadaya dalam kegiatannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya di lingkungannya, bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak di bidang sosial, tidak terlibat dalam persaingan politik untuk merebut kekuasaan, bersifat inklusif (melengkapi beragam kelompok) dan menghargai keragaman. (Haniah Hanifie Dan Ana Sabhana Azmy, 2018: 38).

B. Penelitian Relevan

Ada beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut di antaranya; Penelitian yang dilakukan Mahasiswa lulusan Universitas Sunan Kali Jaga Yokyakarta pada tahun 2019 dengan nama, **Muhammad Awa**. Penelitian ini berjudul “**Peran *Civil society* dalam Proses Perdamaian di Patani (Studi Pada lembaga Patani raya untuk kedamaian dan pembangunan)**”. Pembahasan dalam penelitian ini yakni tentang bagaimana usaha yang dilakukan LEMPAR dalam mengusahakan perdamaian dan menghimpun organisasi lainnya dalam memperjuangkan perdamaian di Patani. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan lainnya. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada perbedaan organisasi yang menjadi subjek penelitian. *Civil Society Assembly for Peace* (CAP) dan LEMPAR sama sebagai *Non-Government Organization* (NGO) yang memperjuangkan perdamaian di Selatan Thailand.

Selanjutnya, penelitian atas nama **Resa Rasidah** merupakan dosen di Jurusan Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur, dengan Judul “**INGO sebagai *Agent Of Aid*: Peran dan Kontribusi *OXFAM Internasional* (Penyaluran Bantuan Untuk Pengentasan kemiskinan)**”. Jenis penelitian kualitatif deskriptif, membahas tentang peran INGO sebagai organisasi kemasyarakatan dalam penyelesaian suatu masalah yang terjadi secara internasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah pokok pembahasan NGO sebagai organisasi perdamaian. Sedangkan penelitian Resa hanya meninjau 1 titik fungsi dan potensi INGO dalam pembangunan.

penelitian yang dilakukan **Wahyu Rozaki Ginanjar**, sebagai Mahasiswa Magister Ilmu Hubungan Internaional di Universitas Muhammadiyah Yokyakarta, dengan judul “**Peran NGO dalam kata kelola Global; Keterlibatan Amnesty Internaional dalam UN *submit for Refugee and Migrant* 2016**”. Menggunakan metode kualitatif, dan pengumpulan data

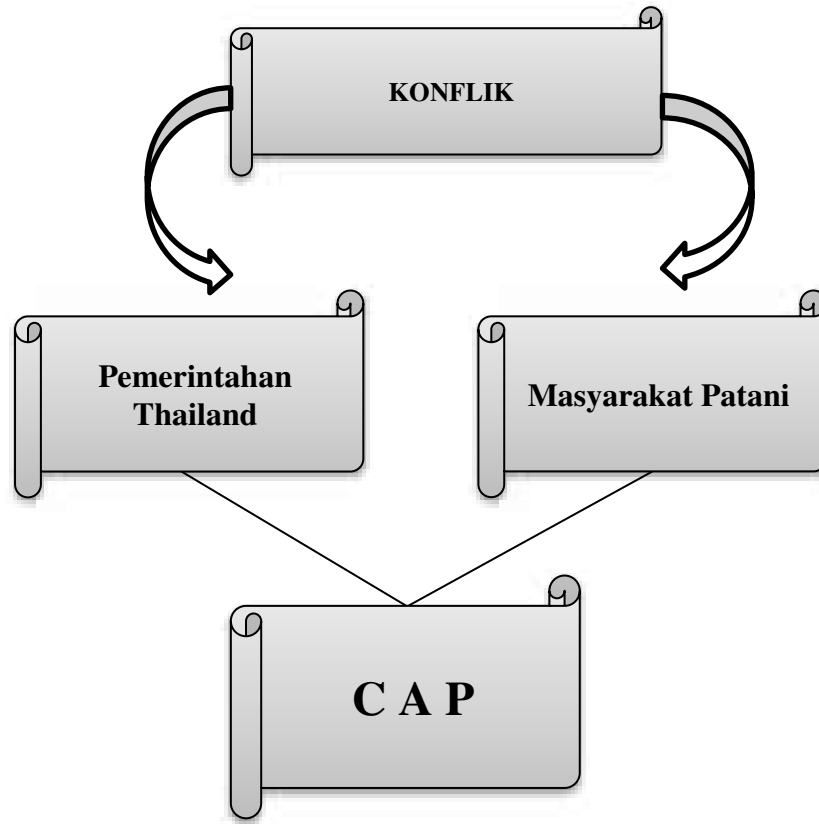
dengan observasi, wawancara, dan sebagainya. Sedikit persamaan, bahwa dalam kedua peneliti membahas peran NGO.

Jurnal yang berjudul **Urgentitas masyarakat Madani *Civil Society* dalam Mengurai Problematika Sosial: Suatu Tinjauan Terhadap Varian Konflik di Lombok** tulisan ini ditulis oleh Ihsan Hamid di UIN Mataram pada tahun 2019 perbedaan tulisan ini dengan Skripsi Peneliti adalah subjek penelitian tulisan Ihsan ini dilakukan di Lombok sedangkan tulisan peneliti dilakukan di selatan Thailand sedangkan persamaannya yaitu membahas proses penguatan *Civil Society* dalam masyarakat.

Karya Tulis oleh Emizal Amri yang berjudul **Pola Hubungan Negara dan *Civil Society Patterns State and Civil Society Relation*** dalam penelitian ini membahas tentang central strategi penguatan *Civil Society* di Sumatera Barat pada tahun 2016. Persamaannya penelitian ini sama-sama membahas hal-hal yang bisa dilakukan oleh *Civil Society* dalam bermasyarakat. Perbedaannya adalah dalam tulisan Emizal ini mengambil subjek di Sumatera Barat sedangkan Peneliti membahas *Civil Society Assambly For Peace* dalam penguatan *Civil Society* di selatan Thailand.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah batas-batas yang akan diteliti untuk menghindari permasalahannya tidak terlalu kompleks sehingga hasil penelitian menjadi jelas dan terarah, dan tidak menyimpang dari pembahasan. Menurut Rajiman dan Purwat (1987) mengemukakan pendapat tentang kerangka pemikiran yang membahas sebuah konsep yang terdiri dari hubungan antara sebab dan akibat atau disebut juga dengan kausal hipotesis.

Bagan 3. 1: Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita dibalik fenomena secara mendalam

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang bagaimana keterlibatan *Civil Society Assembly For Peace (CAP)* dalam Penguatan *Civil Society* di Selatan Thailand, tantangan *Civil Society Assembly For Peace (CAP)* dalam Penguatan *Civil Society* di selatan Thailand dan juga respon masyarakat Patani dan pemerintah Thailand terhadap kehadiran *Civil Society Assembly For Peace (CAP)* (Syahrums 2012:41).

B. Latar dan Waktu Penelitian

Latar dalam penelitian ini di Sekretariat *Civil society Assembly For Peace (CAP)* Jl. Kaklapo no 39, Kec.Muang, Prov.Patani 94000. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, dimulai bulan Mei sampai Juni 2022.

C. Subjek Penelitian

Peneliti memberikan kriteria terhadap subjek penelitian. Hal ini penting yang berguna sebagai patokan subjek yang dianggap tepat dan dapat memberi informasi yang peneliti butuhkan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Pengurus *Civil society Assembly For Peace*
2. Tokoh Agama
3. Organisasi Pemuda
4. Wartawan Media Patani
5. Masyarakat Patani

Kriteria penentuan subjek penelitian ini didasarkan pada kedekatan subjek pada masalah penelitian yakni Keterlibatan *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) Dalam Penguatan *Civil Society* Di Selatan Thailand. Diharapkan para informen yang telah ditetapkan dapat memberikan informasi dan data yang valid.

D. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan. Adapun instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sementara itu, instrumen pendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kamera, yaitu digunakan untuk memotret objek yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.
2. Alat perekam, yaitu digunakan untuk merekam informasi pada saat melakukan wawancara dengan informan penelitian.
3. Lembar observasi, yaitu digunakan untuk mencatat informasi atau data yang diperoleh pada saat wawancara dalam penelitian.
4. Pedoman wawancara, yaitu panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian.

E. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif biasa mengumpulkan data dari beragam sumber seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbangan hanya

mampu pada satu sumber data saja. Kemudian, adapun sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh peneliti. (Umar 2003), data primer diperoleh melalui wawancara dengan informen kunci (*key informan*) secara mendalam (*in-depth interview*) Adapun informen yang ditetapkan dalam penelitian ini antara lain pengurus dan anggota CAP, Tokoh agama, tokoh pemuda, Wartawan Patani, dan Masyarakat Patani.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, misalnya penelitian arus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen, Menurut Sugiyono 2018 data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja. (Sugiyono 2018). Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berubungan dengan penelitian, selain itu peneliti juga mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun definisi teknik pengumpulan data menurut para ahli: Riduwan (2010), mengatakan Teknik pengumpulan data ialah metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011), Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah ialah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan, Sugiyono (2013), juga mengatakan

Arti teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Rina Hayati 2021).

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa). Secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan (Sugiyono 2015:88).

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan dituangkan dalam sebuah catatan. Adapun pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tentang Keterlibatan *Civil society Assembly For Peace* (CAP) dalam Penguatan *Civil society* di Selatan Thailand.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Syahrudin 2012:44).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen. Dalam hal ini dokumentasi berkaitan dengan sumber informasi baik informan buku undang-undang dan sebagainya.

G. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Berikut ialah ringkasan analisis kualitatif interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman:

1. Reduksi Data

Data yang peneliti diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau uraian terperinci, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu yang berkaitan dengan masalah, seperti menstabilkan ataupun menebalkan hal-hal yang di fokuskan saja. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara mengenai Keterlibatan *Civil society Assembly For Peace* (CAP) dalam Penguatan *Civil society* di Selatan Thailand.

2. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atau kesimpulan. Penyajian yang paling sering digunakan ialah bentuk teks naratif.

Penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, meliputi: berbagai jenis matrix, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padat dan mudah dipahami, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi.

Penyajian data tidaklah terpisah dari analisis. Ini merupakan bagian dari analisis. Merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis data dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis.

Hal itu juga merupakan kegiatan reduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal (Miles & Huberman, 2005).

H. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data.

Penelitian ini, uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi sendiri adalah teknik pemeriksaan atau pengujian data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Nusa Putra dalam Sugiyono terdapat 3 jenis triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu pengecekan data lebih dari satu sumber untuk memastikan data yang didapat benar atau tidak.
2. Triangulasi Teknik, yaitu pengecekan data dengan menggunakan berbagai cara secara bergantian apakah datanya sesuai atau tidak dengan yang sebenarnya.
3. Triangulasi Waktu, yaitu triangulasi teknik untuk pengecekan data dengan memeriksa keterangan dari sumber yang sama dengan waktu yang berbeda (pagi, siang, sore dan malam) (Nusa, Putra. 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Peneliti akan melakukan pengecekan data berulang dari beberapa sumber terkait dan

membandingkan data dari beberapa sumber yang didapat sesuai dengan Keterlibatan *Civil Society Assembly For peace* (CAP) dalam Penguatan *Civil Society* di Selatan Thailand.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini Penulis dalam bab ini, akan menjelaskan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang judul skripsi yaitu Keterlibatan *Civil society Assembly for Peace (CAP)* dalam Penguatan *Civil society* di Selatan Thailand. Pembahasan pada bab ini, akan dibagi menjadi 3 Sub fokus, keterlibatan *Civil Society Assembly For Peace* dalam Penguatan *Civil society* di Selatan Thailand, respon masyarakat Patani dan pemerintah Thailand terhadap kehadiran *Civil Society Assembly For Peace* dan tantangan *Civil Society Assembly For Peace* dalam Penguatan *Civil Society* di selatan Thailand.

A. Gambaran Umum *Civil Society Assembly For Peace (CAP)*

1. Sejarah berdirinya *Civil Society Assembly For Peace (CAP)*

CAP merupakan salah satu NGO yang bertujuan mewujudkan perdamaian bagi masyarakat minoritas muslim Patani. Organisasi ini berkedudukan di Bangunan Patani Center, No. 39, Jl. Kala'por, Desa. Ano'ru, Kecamatan. Muang, Pattani, Provinsi Pattani. Sebagai organisasi payung CAP sejak diresmikan Tahun 2020 sampai saat ini telah memiliki sebanyak 27 anggota yang merupakan organisasi-organisasi dari latar pergerakan yang berbeda

Kemunculan *civil society assembly for peace* memiliki sejarah Panjang yang berliku.

Menurut Abdulrohman U-seng, sekretaris organisasi *Muslim Attorney centre Foundation* yang bernaung dibawah organisasi *Civil Society Assembly For Peace* mengatakan bahwa:

“Lahirnya *Civil Society Assembly For Peace (CAP)* bertujuan sebagai organisasi payung untuk menyatukan mengarahkan Organisasi-Organisasi *civil socirty* yang ada di Patani untuk Berjalan atau bekerja dengan misi yang sama bagi mewujudkan kedamaian” (wawancara dengan Abdulrohman U-seng, sekretaris

organisasi *Muslim Attorney centre Foundetion* pada tanggal 18 Mei 2022).

Sejarah pasang surut kemunculan *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) ini tidak lepas dari situasi politik yang terjadi di selatan Thailand. Embrio kemunculan *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) ini telah dimulai dari tahun 2007-2008, dimana pada saat itu para aktivis-aktivis Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan masjid Agung provinsi Patani. Pada saat itu aksi aktivis mahasiswa tersebut menuntut dan menyuarakan kedamaian di Patani. Pasca aksi demonstrasi tersebut pada tahun 2008 gerakan *Civil Society* mulai menguat. Setahun setelah demonstrasi besar-besaran tersebut para aktivis yang berasal dari tempatan (Patani) kemudian menginisiasi terbentuknya organisasi-organisasi mahasiswa Muslim Thailand dari berbagai kampus baik yang berada di Bangkok maupun di Patani sendiri.

Organisasi-organisasi mahasiswa Patani ini berasal dari berbagai kampus yang terhimpun dalam satu organisasi besar yang bernama PERMAS. Para aktivis mahasiswa dari Kawasan Patani dan Bangkok membangun jaringan dan hubungan dengan NGO-NGO yang ada diluar negeri seperti Malaysia philipina Australia untuk mencari pengalaman dari pengalaman tersebut lahirlah sebuah organisasi yang bernama YAKIS yang kemudian berganti nama menjadi PUKIS. Dalam perjalanannya organisasi ini bermertamarposisi menjadi SPAN sebuah organisasi yang bekerja untuk membantu disisi keamanan dan HAP yang bertugas dalam memberikan perlindungan terhadap Haksasi manusia pada masyarakat Patani.

Sebagaimana yang jelaskan oleh hasan yamadibu sekretaris *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) dan sekaligus ketua umum organisasi Bunga Rara Group

“*Civil Society Assembly For Peace* (CAP) ini belum ada lagi di waktu dahulu, waktu dahulu itu ada berbagai organisasi yang muncul dari Mahasiswa-Mahasiswa Patani dengan tujuan yang sama adalah kedamaian untuk masyarakat Patani namun bentuk kerja dan arahnya tidak sama, seperti organisasi MAC, JASAD, Nusantara, dan sebagainya. Pada waktu itu masing-masing organisasi berjalan

dengan arah yang telah diatur oleh masing-masing organisasi.”
(wawancara dengan Hasan Yamadibu’ sekretaris CAP sekaligus
Ketua Umum Bunga Raya Group pada tanggal 05 Mei 2022)

Senada dengan Aiyuab chena’, sektor Umum *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) menjelaskan bahwa kondisi yang sama yang terjadi Ketika sebelum berdirinya organisasi *Civil Society Assembly For Peace* (CAP)

“Pasca demonstrasi di masjid agung Patani mulai bermunculan organisasi-organisasi yang didirikan oleh Mahasiswa Patani seperti MAC, Bunga Raya, Insouth dan sebagainya dengan peran yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan perdamaian di Patani” (wawancara dengan Aiyuab chena’, sektor CAP pada tanggal 20 Mei 2022)

Pada tahun 2010-2011 mulai muncul kesadaran dari beberapa organisasi jika perjuangan dilakukan secara sendiri-sendiri maka perjuangan seperti ini tidak akan melahirkan kekuatan maka disinilah muncul pemikiran dari para aktivis Patani untuk mencari kedamaian di Patani sangat diperlukan strategi yang jelas dan terarah. Maka dibutuhkan sebuah organisasi yang memayungi organisasi-organisasi masyarakat yang memiliki visi misi dan tujuan yang sama untuk mencari kedamaian di Patani.

Gagasan untuk membangun organisasi payung mendapat penolakan dari beberapa organisasi-organisasi lainnya. Kondisi ini tidak membuat Para aktivis *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) berhenti memberikan pemahaman dan pengertian kepada aktivis-aktivis organisasi lainnya dalam berbagai bentuk kegiatan untuk membangun sebuah organisasi payung.

Pada tahun 2013 upaya yang dilakukan oleh *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) mulai menunjukkan hasil. organisasi-organisasi yang ada di Patani yang bertujuan untuk mencari kedamaian di Patani mulai terhimpun dalam satu organisasi payung yang Bernama *Civil Society assembly for Peace* (CAP) namun belum secara resmi. Pada tahun 2015 lahir kebijakan pemerintah Thailand yang membatasi ruang gerak

organisasi-organisasi masyarakat Patani. Kondisi politik ini membuat *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) tidak dapat bergerak bebas sebagai sebuah NGO pada saat itu. Sehingga CAP pada tahun itu rencananya akan diresmikan akhirnya dibatalkan.

Pada tahun 2016 terjadi serangan di camp militer Thailand di bacho provinsi Narathiwat tepatnya sekitar pada bulan Februari kejadian ini berujung pada perundingan perdamaian antara pemerintah Thailand dengan kelompok pembebasan Patani. Pada saat itu CAP mengambil peran sebagai sebuah organisasi yang membela hak asasi manusia. Pasca perundingan perdamaian *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) membuka diri secara resmi kepada masyarakat untuk membela kepentingan-kepentingan masyarakat Patani.

Pada Tahun 2016-2017 berdiri lagi beberapa organisasi seperti BRNG yang merupakan kumpulan para jurnalis dan organisasi *Deep peace* yang bergerak membela hak perempuan dan anak-anak organisasi ini kemudian berganti nama menjadi PERWANI dan Nusantara.

Pada tahun 2020 situasi politik Thailand mulai terbuka. Kondisi politik ini kemudian dimanfaatkan oleh para aktivis organisasi *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) untuk mengproklamkan secara resmi berdirinya organisasi ini. Sebagai organisasi payung, sampai saat ini terdapat 27 organisasi yang telah menyatakan dirinya untuk bergabung dengan *Civil Society Assembly For Peace* (CAP).

2. Tujuan *Civil Society Assembly for Peace* (CAP)

Kehadiran *Civil Society Assembly for Peace* (CAP) sebagai sebuah NGO di Patani tidak terlepas respon kalangan aktivis-aktivis organisasi masyarakat Patani terhadap dampak konflik yang terjadi yang menyebabkan situasi tidak menentu di kalangan masyarakat maka dari itu *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) memfokuskan gerakannya-gerakannya untuk membangun perdamaian di Selatan Thailand dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia secara universal.

Menurut Muhammad Aladi Dengni' selaku ketua Umum *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) tujuan dari organisasi ini adalah

“Tujuan yang melatar belakangi berdirinya *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) ini adalah untuk menyatukan organisasi yang mencari kedamaian di Patani supaya dapat arah tujuan yang sama dan berjuang mencari kedamaian di Patani yang strategi”.(wawancara dengan Muhammad Aladi Dengni', selaku ketua Umum CAP pada tanggal 12 Mei 2022)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Aiyub Chena selaku sektor Umum *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) terkait tujuan berdirinya organisasi ini, yakni:

“Tujuan terbenbuk *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) adalah menyatukan organisasi yang ada di Patani semoga dapat bekerja dengan lebih sratategi dan lebih teratur, namun dalam menyatukan ini CAP tidak paksa dan tidak masuk kacau dengan program-program yang berbagai organisasi yang dipaungi oleh CAP telah rancangkan, bahkan memberi bebas dalam merancangkan program-programnya, CAP hanya menyatukan untuk dapat arus yang sama dan bisa berdiskusi antara mereka agar dapat bisa bekerja sama”(wawancara dengan Aiyub Chena', sektor Umum CAP pada tanggal 20 Mei 2022)

Sementara itu Abdulrohman U-seng, sekretaris organisasi *Muslim Attorney centre Foundetion* (MAC) pada tanggal 18 Mei 2022 menuturkan secara lebih detil terkaiat tujuan lahirnya organisasi payung ini

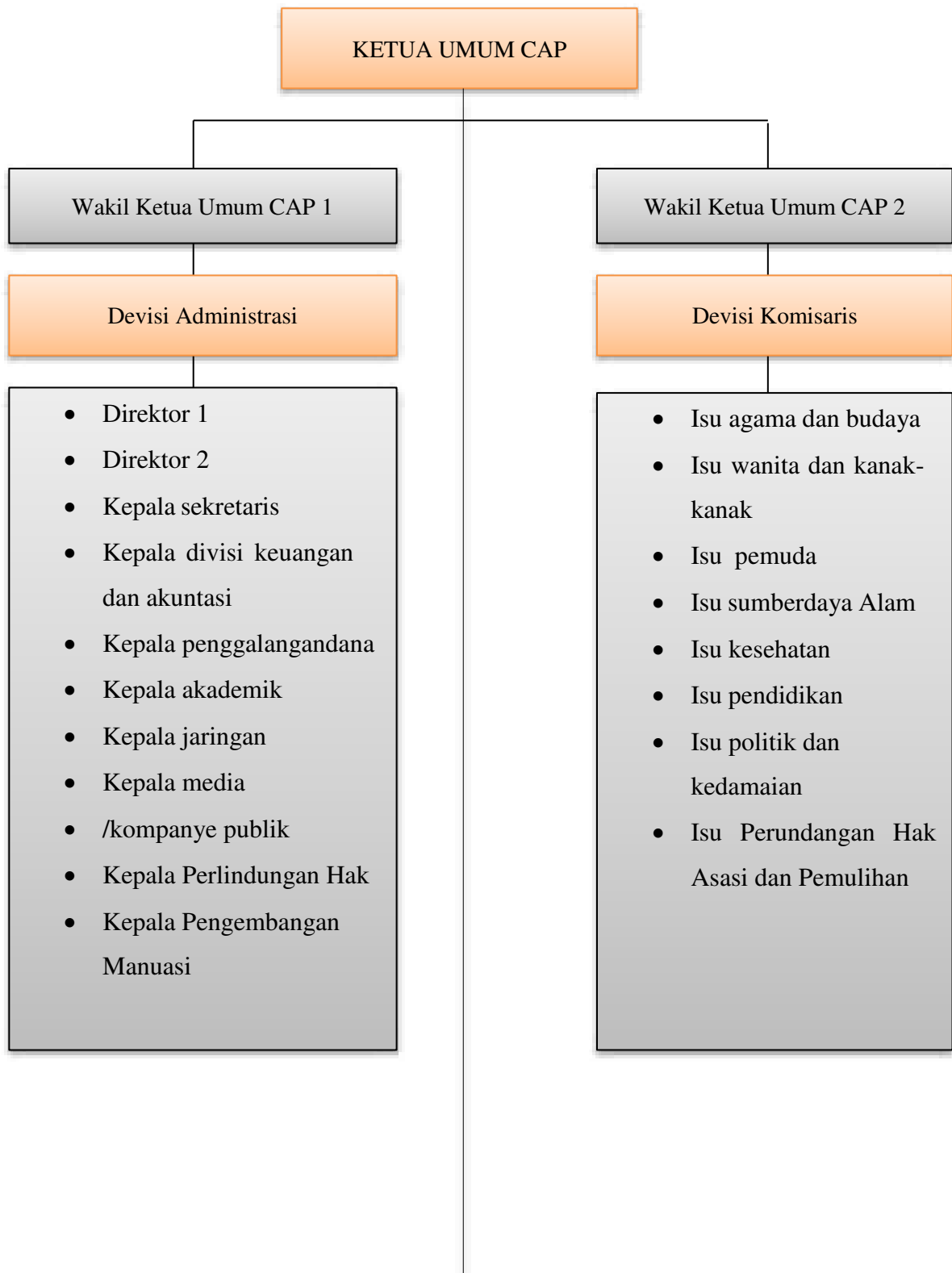
“Tujuan terbentuk *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) adalah karena jika kita lihat pada 7 tahun yang lalu banyak organisasi yang muncul dari Mahasiswa Patani yang bertujuan mendamaikan masyarakat Patani dan berbagai organisasi tersebut mereka menjalankan dengan jalan yang berbeda dan tidak dengan tidak ada arahan yang sama, dengan karena itulah *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) muncul sebagai organisasi payung yang bertujuannya menyatukan dan mengarahkan kearah yang sama, menyatukan para-para aktivis dari berbagai organisasi untuk berbicara serta berdiskusi apa yang telah mereka menemui dan masalah apa yang mereka sedang hadapi”.(wawancara dengan Abdulrohman U-seng, sekretaris organisasi *Muslim Attorney centre Foundetion* (MAC) pada tanggal 18 Mei 2022)

berdasarkan dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh para informen diatas dapat disimpulkan bahwasanya tujuan *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) adalah Untuk menghimpun serta mendukung program kerja diantara organisasi untuk rakyat Patani, menggabungkan kekuatan untuk bergerak dan penyelesaian konflik di zona damai dan Menjadi pusat pengembangan personel masyarakat sipil untuk perdamaian.(sumber: ARD/ART CAP)

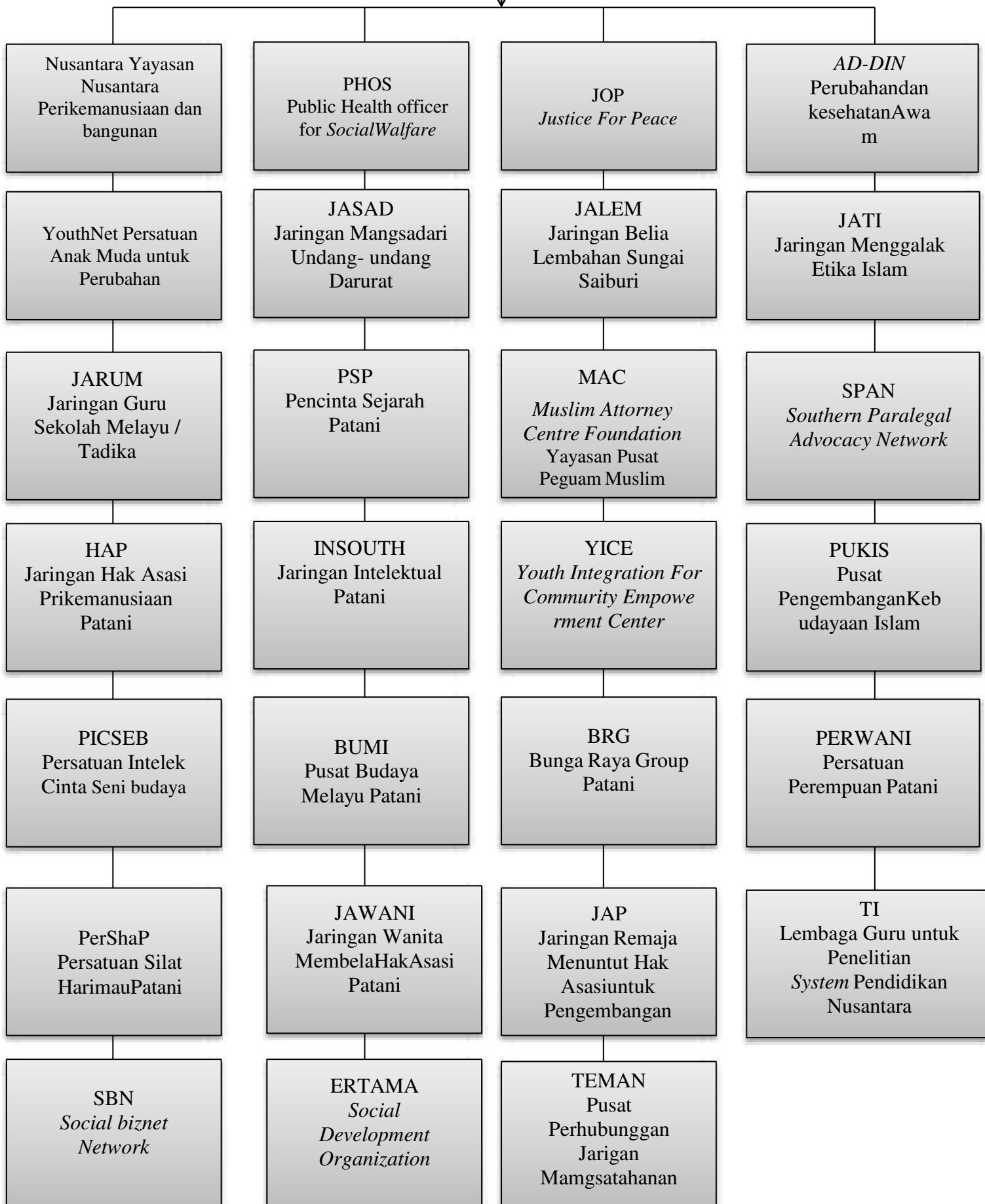
3. Struktur Organisasi *Civil Society Assembly For Peace*

Adapun struktur organisasi *Civil society assembly for peace-CAP* antara lain sebagai berikut:

Bagan 4. 1: Struktur Organisasi Cap



Anggota CAP



4. Keanggotaan *Society Assembly for Peace (CAP)*

Organisasi yang jadi anggota CAP adalah:

1. Nusantara : Yayasan Nusantara Perikemanusiaan dan bangunan.
2. *Public Health officer for Social Welfare (PHOS)*.
3. *Justice For Peace (JOP)*.
4. AD-DIN Perubahan dan Kesehatan Awam (AD-DIN).
5. Persatuan Anak Muda untuk Perubahan (*YouthNet*).
6. Jaringan Mangsadari Undang-undang Darurat (JASAD).
7. Jaringan Belia Lembahan Sungai Saiburi (JALEM).
8. Jaringan Menggalak Etika Islam (JATI).
9. Jaringan Guru Sekolah Melayu/Tadika (JARUM).
10. Pencinta Sejarah Patani (PSP).
11. *Muslim Attorney Centre Foundation Yayasan Pusat Peguam Muslim (MAC)*.
12. *Southern Paralegal Advocacy Network (SPAN)*.
13. Jaringan Hak Asasi Perikemanusiaan Patani (HAP).
14. Jaringan Intelektual Patani (INSOUTH).
15. *Youth Integration For Community Empowerment Center (YICE)*
16. Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam (PUKIS).
17. Persatuan Intelek Cinta Seni Budaya (PICSEB).
18. Pusat Budaya Melayu Patani (BUMI).
19. Bunga Raya Group Patani (BRG).
20. Persatuan Perempuan Patani (PERWANI).
21. Persatuan Silat Harimau Patani (PerShaP).
22. Jaringan Wanita Membela Hak Asasi Patani (JAWANI).
23. Jaringan Remaja Menuntut Hak Asasi untuk Pengembangan (JAP).
24. Lembaga Guru untuk Penelitian System Pendidikan Nusantara (TI).
25. *Social biznet Network (SBN)*
26. *Social Development Organization (PERTAMA)*
27. Pusat Perhubungan Jaringan Mangsa tahanan (TEMAN) (Media social CAP 2022, 25 Mei 2022)

B. Keterlibatan *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) dalam penguatan *Civil society* di selatan Thailand

Dalam merespon krisis kemanusiaan akibat konflik yang terjadi dalam sebuah negara kehadiran NGO sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat. Begitu juga kehadiran *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di selatan Thailand. *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) sebagai sebuah *Non-government organization* telah memaikanan peran strategis dalam mengatasi krisis tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (hasan yamadibu, sekretaris CAP sekaligus Ketua Umum Bunga Raya Group) mengungkapkan

“Kerja *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) yang pokoknya adalah menyatukan arahan yang sama kepada organisasi yang ada di bawahnya karena kerja-kerja untuk mendapatkan kedamaian di Patani organisasi yang ada di bawah CAP mereka telah merencanakan bagi setiap organisasi. *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) hanya mengangkat acara-acara yang belum dirancang oleh organisasi-organisasi yang ada di bawah CAP atau acara yang mereka tidak mampu untuk mengangkat maka disinilah CAP ambil alih”.
(wawancara dengan hasan yamadibu, sekretaris CAP sekaligus Ketua Umum Bunga Raya Group pada tanggal)

Sementara itu sektor CAP menjelaskan secara rinci tentang keterlibatan CAP dalam mewujudkan perdamaian di selatan Thailand

“Adapun program-program yang digarap oleh *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) selama ini banyak sekali diantaranya adalah, masalah Politik dan Perdamaian, Masalah Agama dan Budaya, Masalah Pendidikan, Masalah wanita dan kanak-kanak, Hukum, hak asasi manusia dan masalah donor, Masalah pemuda, Masalah sumberdaya Alam, Masalah kesehatan dan lain-lainnya Dan salah satu dari kerja *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) adalah menciptakan program-program yang organisasi-organisasi di bawahnya belum rancang seperti (Himpun Pemuda Seluruh Patani dipantai ta’luban dan berpakaian baju melayu), program ini yang tidak mampu oleh organisasi di bawahnya mengangkat, maka program-program secara besar-besaran seperti ini akan dilaksanakan oleh CAP.”.(wawancara dengan Aiyub Chena’, Sektor Umum CAP pada tanggal 20 Mei 2022)

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh (Abdulrohman U-seng, sekretaris organisasi *Muslim Attorney centre Foundetion* (MAC)

“Sebenarnya Kerja utama CAP adalah untuk mengarahkan Organisasi yang bernaung dibawah CAP sehingga memiliki arah yang sama untuk menciptakan perdamaian pada masyarakat Patani. Sehingga organisasi-organisasi yang ada di Patani tidak berjalan sendiri-sendiri dan masalah yang di hadapi oleh masyarakat Patani dapat diselesaikan secara Bersama. Sejauh ini CAP sudah terlibat dalam berbagai kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Patani. Terkait dengan program-program CAP diantaranya Politik dan Perdamain, Agama dan Budaya, Pendidikan, perempuan dan kanak-kanak , Hukum, hak asasi manusia dan masalah pembantuan, kepemudaan, sumberdaya Alam, lingkungan, kesehatan dan lain sebagainya”.(wawancara dengan Abdulrohman U-seng, sekretaris organisasi *Muslim Attorney centre Foundetion* (MAC) pada tanggal 18 Mei 2022).

Organisasi *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) adalah organisasi payung yang memayungi organisssi-organisasi Mahasiswa yang mencari kedamaian di selatan Thailand/Patani, bagi mahasiswa Patani mereka menganggap sistem pemerintahan Thailand yang tidak berpihak kepada mereka salah satunya kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Thailand mereka memandang budaya barat lebih maju daripada melayu dan dimana masyarakat melayu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan melayu yang ada di Patani dimana Advokasi yang lakukan oleh *Civil Society Assembly For Peace* (CAP) adalah mendorong terjutnya perubahan atas kondisi yang tidak ideal atau tidak di harapkan yang di arahkan kepada kebijakan publik yang buat oleh para penguasa.

Jelaskan pula oleh Zakariya khode selaku wartawan Patani beliau menyakan

“CAP hanya mengangkat program-program yang besar saja seperti meangkatkan acara pertandingan membangun pintu gerbang setiap kampung yang berada di Patan untuk menyambut hari Raya Aidilfitri”.(wawanacara dengan Zakariya khode selaku Wartawan Patani pada tanggal 17 Mei 2022).

Seperti mana juga yang di jelaskan oleh Muhammad Aladi Dengni selaku ketua Umum *Civil Society Assembly For Peace* (CAP)

“program-program untuk mencari kedamain di Patani

biasanya dikeluarkan dari organisasi yang dipayungi oleh CAP dan CAP hanya mengeluarkan program-program yang organisasi-organisasi di bawahnya tidak sanggup untuk melaksanakan maka *Civil Society Assembly For Peace (CAP)* akan bertanggungjawab untuk menjalankan” (wawancara dengan Muhammad Aladi Dengni’ sebagai ketua Umum CAP, pada tanggal 12, Mei 2022).

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Organisasi dibawah payung *Civil Society Assembly For Peace (CAP)* tentunya CAP adalah organisasi payung maka berbagai program yang di jalani untuk mencari kedamaian di Patani di laksanakan oleh berbagai organisasin yang berada dibawah naungan *Civil Society Assembly For Peace (CAP)* sepertinya:

1. Organisasi Nusantara Patani membangun Program membela anak yatim seperti pemberian daging kurban kepada anak yatim

Gambar 4.1: Pemberian Daging Kurban Kepada Anak Yatim



(Sumber dokumentasi NUSANTARA Patani)

Gambar 4.2: Organisasi Nusantara Mengadakan Acara Pelatihan Anak Yatim Dalam Merubutkan Biasiswa



(Sumber: dokumentasi Nusantara Patani)

2. Organisasi *Public Health officer for Social Welfare* (PHOS) melaksanakan Program membangun kualitas masyarakat Patani. (*Media social Civil Society Assambly For Peace-CAP*)

Gambar 4.3: Para Aktivistis Phos Turun Lapangan Untuk Cek Kesehatan Masyarakat Patani Di Sabayoi Provin Songkhla



(Sumber: dokumentasi *Public Health officer for Social Welfare*)

Gambar 4.4 : Para Aktivistis Organisasi Public Health Officer For Social Welfare Turun Lapangan Untuk Memberikan Pahaman Tentang Kesehatan Di Sekolah Dasar Agama Kampung Berangae Provinsi Yala



(Sumber: dokumentasi *Public Health officer for Social Welfare*)

Gambar 4.5: Para Aktivistis Organisasi Phos Mengangkat Acara Tentang Minta Bantuan Dari Masyarakat Patani Untuk Membantu Warga Negara Malaysia Yang Berpengalami Banjir



(Sumber: dokumentasi *Public Health officer for Social Welfare*)

3. Organisasi *Justice For Peace* (JOP) membangun Program mendukung keadilan untuk kedamaian di Patani (Page Facebook *Justice For Peace-JOP*).

4. Organisasi AD-DIN Perubahan dan Kesehatan Awam (AD-DIN) membangun Program membela Kesehatan masyarakat Patani oleh (*Media social Civil Society Assambly For Peace-CAP*).

Gambar 4.6: Para Aktivistis Organisasi Ad-Deen Bersama Organisasi Nusantara Dalam Melaksanakan Acara Yang Bernama Membangun Impian Dan Meningkatkan Ketaqwaan Anak Yatim Seluruh Patani



(Sumber: dokumentasi AD-DIN Perubahan dan Kesehatan Awam)

5. Organisasi Persatuan Anak Muda untuk Perubahan (*YouthNet*) bertugas diprogram membangun anak muda untuk berubahan kearah maju (*page facebook YouthNet*).

Gambar: 4.7: Para Aktivistis Organisasi Youtnet Mengada Acara Pemberian Makanan Kepada Masyarakat Patani Yang Tertimpa Bujur



(Sumber: dokumentasi Youhnet เครือข่ายคนหนุ่มสาวเพื่อการเปลี่ยนแปลง)

2. Organisasi Jaringan Mangsa dari Undang-undang Darurat (JASAD) membangun program membela masyarakat yang terpengaruhi pada Undang-undang darurat. (*Page facebook Jaringan Mangsadari Undang-undang Darurat-JASAD*).

Gambar 4.8: Pemberian Kain Sarung Oleh Organisasi JASAD



(Sumber: dokumentasi *Civil society Assembly for Peaca-CAP*)

Gambar 4.9: Pembekalan Materi Tentang Ham Oleh JASAD



(Sumber: dokumentasi *Civil society Assembly for Peaca-CAP*)

3. Jaringan Belia Lembahan Sungai Saiburi (JALEM)

Organisasi ini bergerak pada bidang lingkungan terutama advokasi terhadap eksploitasi sungai Saiburi Pattani (*Media social Civil Society Assambly For Peace-CAP*)

Gambar: 4.10: Aktivis Dari Organisasi Jaringan Belia Lembahan Sungai Saiburi Turun Lapangan Untuk Mengadakan Acara Melestarikan Hutan Dengan Konsep Menjaga Sungai Saiburi Di Saiburi Provinsi Patani



(Sumber: dokumentasi Jaringan Belia Lembahan Sungai Saiburi)

4. Jaringan Menggalak Etika Islam (JATI)

Organisasi ini menjalankan Program-program dalam bidang dakwah dalam rangka mengsiarkan etika Islam pada masyarakat Patani. (*Media social Civil Society Assambly For Peace-CAP*).

Gambar 4.11: Organisasi Jaringan Menggalak Etika Islam Mengadakan Acara Penyampaian Tentang Manajemen Keluarga Untuk Keharmonisan Atau Kemesraan Dalam Bulan Ramadhan



(Sumber dokumentasi Jaringan Menggalak Etika Islam)

5. Jaringan Guru Sekolah Melayu/Tadika (JARUM)

Organisasi ini merupakan kumpulan para guru dan Pendidikan yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas Pendidikan terhadap anak-anak Patani beberapa program yang dijalankan oleh organisasi ini seperti pelatihan guru Taman Didikan Kanak-kanak (TADIKA) dan pelatihan penyusunan materi-materi ajar yang akan di ajarkan di sekolah-sekolah yang terdapat di Patani (*Page Facebook JARUM : Jaringan Guru Sekolah Melayu/Tadika*).

GAMBAR 4.12: Organisasi Jaringan Guru Sekolah Melayu Menuntut Kepada Pemimpin Militer Bahwa Ada Militer Masuk Di Sekolah Didikan Agama Dengan Tidak Di Undang, masuknya tanpa ada surat-menyurat Dan Foto KTP Para-Para Guru



(Sumber: dokumentasi jaringan guru sekolah Melayu/TADIKA)

6. Organisasi Pencinta Sejarah Patani (PSP)

Organisasi ini bergerak dalam bidang sejarah terutama dalam mengkaji, mengajarkan dan menginformasikan sejarah Patani kepada generasi muda agar terciptanya kesadaran sejarah secara kolektif bagi anak-anak muda Patani (*Page facebook* Pencinta Sejarah Patani PSP).

Gambar 4.13: Kunjungan Pecinta Sejarah Patani Kerumah Singgora



(Sumber: dokumentasi Pecinta Sejarah Patani-PSP)

Gambar 4.14: Organisasi Pecinta Sejarah Patani Pemberian Pahaman Kepada Masyarakat Patani Tentang Sejarah Patani



(Sumber: dokumentasi Pecinta Sejah Patani-PSP)

7. Organisasi *Muslim Attorney Centre Foundation* Yayasan Pusat Peguam Muslim (MAC) Program menjunjung tinggi moral dan supremasi hukum bagi haknya di langgar, Program didikan Hak asasi manusia dan kebebasan sipil dibawah hukum Thailand kepada masyarakat Patani yang dibangun oleh *Muslim Attorney Centre Foundation Yayasan Pusat Peguam Muslim MAC* (Page facebook *Muslim Attorney Centre Foundation Yayasan Pusat Peguam Muslim MAC*).

Gambar 4.15: Aktivis Organisasi *Muslim Attorney Centre Foundation* (MAC) Mengundang Para Ulama Patani Untuk Mencari Solusi Dalam Pengolahan Jinazah Yang dari Penyakit Covid-19



(Sumber dokumentasi *Muslim Attorney Centre Foundation*)

8. Organisasi *Southern Paralegal Advocacy Network* (SPAN) membangun Program mengadakan asisten pengacara Muslim. (*Media social Civil Society Assambly For Peace-CAP*)
9. Organisasi Jaringan Hak Asasi Perikemanusiaan Patani (HAP) menjalankan Program-program membela Hak asasi perikemanusiaan masyarakat Patani. (*Media social Jaringan Hak Asasi Perikemanusiaan Patani-HAP*), (*Patani Human Right Organization*)

Gambar 4.16: Kunjungan Mahasiswa Patani Ke Hap



(Sumber: dokumentasi *Civil society Assembly for Peaca-CAP*)

Gambar 4.17: Organisasi Patani Human Rights Organization Mengadakan Acara Mengembangkan Potensi Dan Penilaian Kesehatan Mental Masyarakat Patani Yang Sedang Mengalami Dengan Kondisi Konflik Di Patani.



(Sumber: Halaman dokumentasi *Patani Human Right Organization*)

10. Organisasi Jaringan Intelektual Patani (INSOUTH) bergerak diprogram membangun sukarelawan para-para Intelektual dalam membantu masyarakat Patani (*Page facebook INSOUTH*)

Gambar 4.18: Aktivis Organisasi Jaringan Intelektual Patani Diskusi Bersama Akvitifis Organisasi Jop, Hap, PSP Dan Sebagainya Tentang Membangun Kegiatan-Kegitan Demi Kemajuan Patani



(Sumber: dokumentasi Jaringan Intelektual Patani (INSOUTH))

11. Organisasi *Youth Integration For Community Empowerment Center*(YICE) organisasi ini bergerak program-program membangun Pemuda dan Pemudi untuk meningkatkan kualitas Pemuda pemudi Patani agar mereka bisa memahami dengan kondisi dunia global (*Media social Civil Society Assambly For Peace-CAP*)

Gambar 4.19: Aktivistis Organisasi *Youth Intergration For Community Empowerment Center* Turun Lapangan Untuk Membantu Warga Masyarakat Yang Mengalami Militer Thailand Sering Ke Rumah Mereka



(Sumber dokumentasi *Youth Intergration For Community Empowerment Center*)

Gambar 4.20: Aktivistis Organisasi *Youth Intergration For Community Empowerment Center* Bersama Wartani Dalam Melaksanakan Kegiatan Yang Bernama Warga Negara Untuk Perubahan



(Sumber dokumentasi *Youth Intergration For Community Empowerment Center*)

12. Organisasi Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam (PUKIS) membangun Program menyerukan dan mengembangkan tentang kebudayaan Islam. (Page Facebook Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam PUKIS)

Gambar 4.21: Famplet Diskusi Online Oleh Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam



(Sumber: dokumentasi : Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam)

Gambar 4.22: Kunjungan Situs Sejarah Patani.



(Sumber: dokumentasi Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam)

13. Organisasi Persatuan Intelek Cinta Seni Budaya organisasi ini bergerak dengan program-program membela senibudayaan. (PICSEB) (*Page Facebook PICSEB*).

Gambar 4.23: Foto Aktivis Organisasi Intelek Cinta Seni Budaya Mengadakan Main Bola Bersama Untuk Mengeratkan Buhungan Diantara Para Aktivis Dalam Organisasinya



(Sumber dokumentasi Intelek Cinta Seni Budaya)

14. Organisasi Pusat Budaya Melayu Patani (BUMI) menjalankan program-program membela dan membagikan pahaman tentang budaya melayu kepada masyarakat melayu dan masyarakat lainnya (*Media social Civil Society Assambly For Peace-CAP*).

Gambat 4.24: Aktivis Organisasi Pusat Budaya Melayu Patani Bersama Warga Negara Patani Di Provinsi Yala Dalam Mengadakan Kegiatan Cinta Budaya Melayu



(Sumber dokumentasi Pusat budaya Melayu Patani)

15. organisasi Bunga Raya Group Patani (BRG) Program membangun system Pendidikan di sekolah agama yang Bernama taman didikan kanak-kanak (TADIKA) program ini di bangun oleh Bunga Raya Group Patani (*Page Facebook Bunga Raya Group Patani*)

Gambar 4.25: Pelatihan Terhadap Guru Yang Di Laksanakan Oleh Bunga Raya Gruop Patani



(Sumber: dokumentasi Bunga Raya Gruop Patani)

16. Organisasi Persatuan Perempuan Patani (PERWANI) bergerak program-program bantuan hak asasi manusia kepada perempuan dan anak-anak yang terpengaruh dari kekerasan yang ada di wilayah Patani program ini dibangun oleh organisasi PERWANI (*Page Facebook PERWANI*).

Gambar 4.26: Aktivistis Organisasi Persatuan Perempuan Patani Mengadakan Acara Kehilangan Seorang Yang Menuntut Keadilan Di Selatan Thailand Beliau Bernama Tnay Somchai



(Sumber dokumentasi Persatuan Perempuan Patani)

17. Organisasi Persatuan Silat Harimau Patani (PerShaP) bergerak Program-program ngajar silat Hariamu Patani agar generasi penerus bisa mengerti dengan ilmu-ilmu silat harimau Patani (*Page Facebook Persatuan Silat Harimau Patani-PerShaP*).

Gambar 4.27: Organisasi Persatuan Silat Harimau Patani Mengadakan Acara Tampilan Persembahan Silat Harimau Pantai di Pantai Patani



(Sumber: dokumentasi Persatuan Silat Harimau Patani-PerShaP)

18. Jaringan Wanita Membela Hak Asasi Patani (JAWANI) menjalankan Program-program membela Hak asasi perikemanusiaan masyarakat Patani (*Page Facebook Jaringan Wanita Membela Hak Asasi Patani-JAWANI*).

Gambar 4.28: Aktivis Organisasi Jaringan Wanita Membela Hak Asasi Patani Turun Lapangan Untuk Mengziarahi Keluarga Pejuang Patani Yang Meninggal Karena Peperangan Dengan Militer Thailand Berjumlah 6 Orang Syahid



(Sumber dokumentasi Jaringan Wanita Membela Hak Asasi Patani)

19. Organisasi Lembaga Guru untuk Penelitian System Pendidikan Nusantara (TI) menjalankan tugas dengan program-program penelitian sistem Pendidikan di nusantara semoga pendidikan anak melayu Patani tidak ketinggalan oleh dunia global (*Page Facebook Lembaga Guru untuk Penelitian System Pendidikan Nusantara*).

Gambar 4.29: Aktivis Organisasi Lembaga Guru Untuk Penelitian System Pendidikan Nusantara Mengadakan Acara Seminar Pendidikan Tentang Ngajar Mengajar Peserta Didik



(Sumber dokumentasi Lembaga Guru untuk Penelitian System Pendidikan Nusantara)

20. Organisasi *Social Development Organization* (PERTAMA) membangun Program menyatukan para guru ngajar taman didikan kanak-kanak untuk mengembangkan keilmuan yang baru dan semoga dapat Informasi tentang isi ngajarnya pada arah yang sama program ini di bangun oleh organisasi *Social Development Organization (Media social Civil Society Assambly For Peace-CAP)*

Gambar 4.30: Aktivis Organisasi *Social Develoment Organization* Mekukan Pemberian Makanan Kepada Masyarakat Patani Bertimpa Dengan Banjir



(Sumber dokumentasi *Social Development Organization*)

21. Organisasi Pusat Perhubungan Jaringan Mangsa tahanan (TEMAN) membangun Program pengumpulan dana untuk membantu saudara masyarakat Patani yang di tangkap oleh pemerintah Thai dengan isu kedamaian dimana program ini di bangun oleh Organisasi Pusat Perhubungan Jaringan Mangsa tahanan (Page Facebook TEMAN เครื่องข่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต).
22. Jaringan Remaja Menuntut Hak Asasi untuk Pengembangan (JAP) menjalan program-program menuntut hak asasi untuk kemajuan

Gambar 4.31: Aktivis Organisasi Jaringan Remaja Menuntut Haksasi Untuk Pengembangan Mengadakan Pemberian Materi Tentang Meningkatkan Kualitas Masyarakat Di Era Globalisasi Sekarang Ini.



(Sumber dokumentasi Remaja Menuntut Hak Asasi untuk Pengembangan)

23. Program-program yang tidak mampu untuk dilaksanakan oleh organisasi diatas akan dilaksanakan oleh CAP seperti nya.

Gambar 4.34: Himpunan Pemuda Seluruh Patani Dengan Berpakaian Baju Melayu



(Sumber: dokumentasi *Civil society Assembly for Peaca-CAP*)

Gambar 4.35: Pembagian Makanan Kepada Orang Di Penjara Pada Hari Raya Ke-2 Aidil Adha



Sumber: dokumentasi *Civil society Assembly for Peaca-CAP*)

C. **Tatangan *Civil society Assembly for Peaca* dalam Penguatan *Civil society* di selatan Thailand**

Gerakan *Civil society* muncul karena adanya dominasi dan otoritarian dalam praktik kekuasaan oleh penguasa negara yang otoriter, praktek ini kemudian memaksa masyarakat untuk menggalang kekuatan dalam rangka melakukan perlawanan terhadap kekuasaan otoritarian tersebut. Dalam perkembangannya, konsepsi *civil society* di Negara-negara Barat (terutama Eropa Barat) mengalami proses dominasi dan pasang surut pada tataran praksis. Selain itu, kelompok-kelompok masyarakat di negara tersebut juga telah berupaya mendorong terciptanya pergerakan sosial yang berbasis pada solidaritas.

Kehadiran *Civil society Assembly for Peaca-CAP* sebagai sebuah Gerakan *civil society* di selatan Thailand memunculkan reaksi yang beragam dari berbagai elemen terutama dari kalangan pemerintah Thailand. *Civil society Assembly for Peaca-CAP* dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan bagi pemerintah Thailand. Hal ini terlihat adanya upaya-upaya pemerintah Thailand dalam menekankan membatasi ruang gerak organisasi-organisasi masyarakat khususnya *Civil society Assembly for Peaca-CAP*.

Sebagaimana yang ungkapkan oleh Muhammad Aladi dengni, ketua umum CAP

“Bagi kerajaan Thailand, apabila ada organisasi-organisasi yang bukan berasal dari kerejaan langsung mereka anggap sebagai lawannya. Karena mereka dianggap melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan pemerintah. apalagi mendirikan organisasi-organisasi yang bertujuan menciptakan perdamaian di selatan Thailand. Inilah yang kemudian menjadi salah satu tentang *Civil society Assembly for Peaca-CAP*. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *Civil society Assembly for Peaca-CAP* selalu di mata-matai oleh Pemerintah Thailand. Dengan dalih perundingan pemerintah Thailand mengundang para aktivis kecamp meliter terkadang tidak bisa pulang 3-7 hari, terkadang di larang jika membuat acara yang sangat tidak disukai oleh pemerintah, pembatasan kegiatan dan bahkan aktivis *Civil society Assembly for Peaca-CAP* di tangkap, siksa sehingga cobaan-cobaan seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi aktivis *Civil society Assembly for Peaca-CAP*.” (wawancara dengan Muhammad Aladi dengni’ ketua umum CAP pada tanggal 12 Mei 2022)

Tidak hanya pembatasan dan intimidasi yang peroleh para aktivis *Civil society Assembly for Peaca-CAP* tekanan-tekanan untuk membangun kerjasama dan jaringan dengan berbagai organisasi NGO yang ada berbagai negara juga di batasi. Sebagaimana yang di paparkan lebih lanjut oleh Zakariya Khode

“Dan Pemerintah Thailand juga menghadang NGO luar negeri supaya CAP tidak bisa kerja dengan NGO luar negeri sepertinya NGO dari eropa Kerajaan Thailand selalu menghadang semoga mereka tidak bisa kerjasama dengan CAP, pemerintah Thai selalu hadang setiap jalan tentang dana-dana yang berhak turun kepada CAP”. (*wawancara dengan Zakariya Khode, wartawan Patani pada tanggal 20 Mei 2022*)

Kondisi yang sama juga dijelaskan oleh Aiyup Chena, sebagai sektor CAP yang menyebutkan bagaimana tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand terhadap CAP

“Disini Pemerintah Thailand menggap bahwa *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) adalah lawannya. maka banyak resiko-resiko yang dialami oleh CAP, namun *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) tetap konsisten untuk mewujudkan kedamaian di selatan Thailand Alhamdulillah apa yang kita cita-citakan satu persatu mulai terwujud seperti dahulu orang Patani tidak dapat bicara tentang identitasnya, karena dilarang oleh pemerintah Thailand. Melalui perjuangan *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) kebijakan politik ini dihapuskan sehingga saat sekarang masyarakat Patani sudah dapat bicara tentang sejarah dan identitas mereka sendiri dengan tidak merasa takut”. (*wawancara dengan Aiyub Chena’, Sekotr umum CAP pada tanggal 20 Mei 2022*)

Lebih lanjut hasan Yamadibu’ menjelaskan hal yang sama terkait tantangn yang dihadapi oleh *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) dan organisasi-organisasi yang bergabung dibawah payung CAP dalam menjalankan program-programnya untuk kedamaian masyarakat Patani sebagaimana yang sampaikan oleh Hasan yamadibu’ sekretaris *Civil society Assembly for Peaca* (CAP)

“Tentang resiko yang bertemu ini selalu banyak sepeertinya di mata-mata oleh pemerintah di sangka jahat oleh pemerintah, di undang aktivis-aktivis *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) oleh pemerintah untk pergi ketempat camp militer terkadang sampai tujuh hari tidak bisa

pulang, selalu ditutup jalan oleh pemerintah dalam membuat hubungan antar NGO di luar negeri dan sebagainya namun dengan sebagai resiko yang *Civil society Assembly for Peaca (CAP)* mengalami CAP tetap dengan pedirian sehingga dapat satu persatu apa yang di inginkan oleh masyarakat seperti waktu dahulu tidak bisa membicarakan tentang sejarah melayu di marah oleh Pemerintah, pada saat ini sudah bisa orang melayu membicarakan tentang identitas mereka sendiri”. (*wawancara dengan Hasan yamadibu’, sekretaris CAP sekaligus ketua Umum Bunga Raya Group pada tanggal 05 Mei 2022*)”

Sementara itu tantangan yang dihadapi oleh *Civil society Assembly for Peaca (CAP)* tidak hanya berasal dari pemerintah Thailand akan tetapi *Civil society Assembly for Peaca (CAP)* juga menghadapi tantangan berkaitan dengan kesadaran masyarakat Patani terhadap kehadiran CAP sebagai NGO yang tujuan untuk mewujudkan kedamaian di selatan Thailand sebagaimana yang di sampaikan oleh (*wawancara dengan Niyusron Samae ketua Pemuda Kampung Lalo’ Resoh pada tanggal 07 Mei 2022*)

“Masalah yang dihadapi oleh *Civil society Assembly for Peaca (CAP)* banyak sekali terutama sekali masalah membangun kesadaran masyarakat terkait dengan kehadiran CAP, kita masih menemui masalah di lapangan terkait masalah seperti masyarakat belum kenal dengan CAP, masyarakat belum memahami tujuan CAP dan sebagainya melihat kondisi ini kita dari CAP akan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting kehadiran *Civil society Assembly for Peaca (CAP)* untuk mewujudkan kedamaian di selatan Thailand. Harapan kita kedepan *Civil society Assembly for Peaca (CAP)* adalah menjadi milik masyarakat dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang belum bergabung dengan CAP dan masih bergerak untuk mencari kedamaian di selatan Thailand secara sendiri-sendiri” (*wawancara dengan Abdulrohman U-seng, sekretaris organisasi Muslim Attorney centre Foundetion (MAC) pada tanggal 18 Mei 2022*)

Berdasarkandari beberapa temuan penelitian diatas terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh CAP antara lain adalah:

1. Tekanan dan intimidasi dari pemerintah Thailand terhadap para aktivis-aktivis CAP dalam bentuk ancaman fisik

2. Pemerintah Thailand membatasi dan mengontrol terhadap kegiatan yang dilakukan oleh CAP dan organisasi-organisasi yang dipayunginya
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait kehadiran CAP sebagai organisasi yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian di selatan Thailand
4. Pemerintah Thailand menutup ruang gerak CAP untuk membangun jaringan dan Kerjasama dengan NGO-NGO yang ada di negara lain untuk menciptakan kedamaian di selatan Thailand
5. Untuk menyatukan berbagai organisasi-organisasi yang ada selatan Thailand yang masih bergerak secara sendiri-sendiri untuk kedamaian masyarakat selatan Thailand meskipun sampai saat ini sudah 27 organisasi yang bergabung di bawah CAP namun masih banyak lagi organisasi yang belum bergabung dengan CAP.

D. Respon Masyarakat Patani dan pemerintah Thailand Terhadap *Civil society Assembly for Peace*.

Kehadiran *Civil society Assembly for Peace* di dalam masyarakat Patani ini tentu tidak terlepas dari hadirnya unsur-unsur struktural dan kultur inheren di dalamnya. Unsur pertama termasuk terbentuknya negara yang berdaulat, berkembangnya ekonomi pasar, tersedianya ruang-ruang publik bebas, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah, dan kehadiran organisasi-organisasi kepentingan publik.

Pada saat yang sama, *Civil society Assembly for Peace* akan berkembang dan mejadi kuat apabila unsur-unsur kultural yang menjadi landasannya juga kuat. Unsur tersebut adalah pengakuan terhadap HAM dan perlindungan atasnya, khususnya hak berbicara dan berorganisasi, sikap toleransi antar individu dan kelompok dalam rakyat, adanya tingkat kepercayaan publik (*public trust*) yang tinggi terhadap pranata-pranata sosial dan politik, serta kuatnya komitmen terhadap kemandirian individu dan kelompok.

Pada waktu awal kemunculan *Civil society Assembly for Peace* (CAP)

masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami visi misi dan tujuan CAP namun dalam perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir ini, eksistensi mulai mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan di selatan Thailand sebagaimana yang ungkapkan oleh Zakariya khode, wartawan Patani yang menyebutkan bahwa:

“Pada awalnya masyarakat belum tau apa itu *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) dan untuk apa CAP lahir bagi masyarakat Patani. Namun 5 tahun belakangi ini masyarakat sudah mulai kenal dengan CAP dan masyarakat sudah memahami dan mengerti akan arti pentingnya kehadiran *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) adalah untuk membela dan memperjuangkan nasib masyarakat Patani, Pada saat ini para Aktivis sudah banyak yang bergabung dan tertarik masuk kedalam CAP” (wawancara dengan Zakariya Khode, wartawan Patani dapa tanggal 17 Mei 2022)

Lebih lanjut Zakariya khode menilai bahwa meskipun *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat Patani namun pemerintah Thailand menetapkan standar ganda terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Respon kerajaan Thailand terhadap CAP mereka juga ada yang respon kebaikan sepertinya CAP mengangkat acara himpunan Pemuda sereruh Patani dia juga keluaran kata-kata, mereka mengatakan jika CAP hanya membangun tentang kebudayaan kami juga dukung akan tetapi pada hakikat sebenarnya mereka tidak suka apa yang dilakukan oleh CAP, karena ini adalah salah satu membangkitkan semangat bagi masyarakat Patani karena mereka keluar bicara seperti ini tujuannya adalah untuk tidak di pahami oleh mata rakyat Thailand bahwa mereka telah gagal karena acara yang di angkat oleh CAP tadi banyak masuk dalam berita-berita di TV. Maka kegiatan-kegiatan yang lain yang di dukungan oleh Pemerintah itu akan ada keuntungan sebaliknya yang lebih mahal dari apa yang mereka berikan. dan respon keburukan selalu ada sepertinya di mata-mata oleh mereka terkadang di undang ketempat militer dan sebagainya.”(wawancara dengan Zakariya Khode, wartawan Patani dapa tanggal 17 Mei 2022)

Salah seorang tokoh agama Patani sekaligus sekretaris pemuda kampung berangae, Abdulloh wawaeni juga memberikan respon positif terkait keberadaan CAP

“Pada awalnya belum banyak orang yang tau apa itu CAP namun dengan program-program yang dilakukan oleh CAP telah banyak membantu dalam penguatan syiar dakwah Islam di selatan Thailand terutama bagi kalangan anak-anak dan pemuda-pemudi disamping itu *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) berperan aktif dalam membangun kesadaran budaya bagi masyarakat Patani dengan mengangkat kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pengajian keagamaan, berpakaian baju melayu dan lain-lainnya”.
(wawancara dengan Abdulloh wawaeni, tokoh agama sekaligus sekretaris Pemuda kampung berangae pada tanggal 07 Mei 2022)

Meskipun *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) mendapat dukungan dari masyarakat namun menurut Abdulloh wawaeni lebih lanjut pemerintah Thailand tidak menyukai terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) sebagaimana yang diungkapkannya sebagai berikut

“Dengan karena CAP bergerak untuk mendapat kedamaian di selatan Thailand dan ditempat ini konflik selalu berlaku, karena pemerintah Thailand tidak ingin melihat kesadaran masyarakat dan mahasiswa-mahasiswi Patani akan ngerti dengan arti pentingnya kedamaian di tempat mereka. maka dengan Tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh CAP akan membuat tidak suka oleh Pemerintah Thailand dan selalu di mata-mata olehnya (wawancara dengan Abdulloh wawaeni, tokoh agama sekaligus sekretaris Pemuda kampung berangae pada tanggal 07 Mei 2022)

Salah seorang tokoh pemuda Patani, Ni'yusron samae memberikan respon positif terkait kehadiran *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Memang masih ada masyarakat Patani yang belum paham tentang *Civil society Assembly for Peaca* (CAP). Dalam hal ini dibutuhkan sosialisasi tentang keberadaan dan tujuan yang akan di wujudkan oleh CAP. Mungkin saja organisasi ini sebelumnya secara resmi belum dikenal oleh masyarakat Patani. Tetapi akhir-akhir ini organisasi *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) mulai

dikenal oleh masyarakat Patani melalui program-program yang dilakukan oleh *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) di Patani. Melalui perjuangan CAP kita Kembali boleh membinncangkan identitas kita sebagai minoritas muslim di selatan Thailand. Respon positif terhadap CAP ditunjukkan dengan dukungan moril dan material kepada CAP melalui bantuan-bantuan dana kegiatan kepada CAP (wawancara dengan Ni'yusron Samae ketua Pemuda Kampung lalo' Resoh pada tanggal 07 Mei 2022).

Civil society Assembly for Peaca (CAP) Sebenarnya tidaklah memberi harapan kepada Pemerintah Thailand Untuk memberikan dukungan yang baik kepada mereka, sebagaimana kita sudah ketahui bahwa *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) adalah NGO. Jadi sebenarnya kita tidak ingin memandangkan, bahwa mereka telah dianggap CAP sebagai lawannya dan kita serahkan saja bagaimana pemerintah Thailand memandangkan CAP sebagai apa bagi mereka, namun CAP tetap dalam pendiriannya, seperti tetap selalu membangun tetang kebudayaan Melayu, mencari kedamaian dan sebagainya". (wawancara dengan Ni'yusron Samae ketua Pemuda Kampung lalo' Resoh pada tanggal 07 Mei 2022)

Civil society Assembly for Peaca (CAP) sayangnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan respon yang di tunjukan oleh pemerintah Thailand sendiri terhadap organisasi ini. Sampai saat ini pemerintah Thailand masih menganggap organisasi ini sebagai Gerakan yang mengancam stabilitas politik Thailand. Padahal secara tidak langsung organisasi ini telah membantu pemerintah Thailand dalam mewujudkan kedamaian pada masyarakat Patani.

Pandangan yang hampir sama ungkapkan oleh (masyrakat Patani) terkait dengan kehadiran *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) di Patani.

“Pada saat ini *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) sedang berkembang dan akan semakin berkembang. Hal ini di tunjukan semakin besarnya dukungan masyarakat Patani terhadap *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) Masyarakat telah menyadari bahwa CAP adalah organisasi yang membela kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang meskipun pemerintah Thailand memiliki pandangan negatif terhadap *Civil society Assembly for Peaca* (CAP)” (wawancara dengan Tuansufian Tohntae, masyarakat Patani pada tanggal 07 Mei 2022)

Pendapat yang hampir sama juga diberikan oleh Muhammad Aladi dengni', Ketua Umum CAP.

“Bagi masyarakat umum mereka memberi Dukungan terhadap *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) dan masyarakat Juga memberi kepercayaan kepada CAP contohnya CAP mengadakan acara Perhimpunan pemuda berpakaian baju melayu di hari Raya Aidil Fitri hari ke-3 dan yang Pemuda di hari Raya ke-6 jumlahnya ribuan pemuda Dan Puluhan Ribu pemuda jumlah ini adalah jumlah yang bersejarah dikarenakan tidak pernah ada Kaum muda muda yang memberi dukungan seperti ini di NGO yang mencari kedamaian di patani, dengan inilah kita bisa membuktikan bahwa sudah banyak dari kaum muda muda memberi dukungan kepada CAP.

Bagi Pemerintah Thailand, apa bila ada Lembaga-lembaga yang tidak muncul dari mereka, Pemerintah Thailand langsung menganggap lawannya, karena mereka ini bekerja tentang perkara yang tidak disukai oleh pemerintah Thailand, apalagi membangun organisasi-organisasi untuk mencari kedamaian di tempat yang mereka tidak inginkan. Sehingga membuat *Civil society Assembly for Peaca* (CAP) selalu bermasalah dengan Pemerintah Thailand”.
(wawancara dengan Muhammad Aladi dengni', ketua Umum CAP pada tanggal 12 Mei 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang di teliti yaitu keterlibatan *Civil society Assembly For Peace* (CAP) dalam penguatan *civil society* di Selatan Thailand sebagai berikut:

1. *Civil society Assembly For Peace* (CAP) Memberikan banyak kontribusi dalam penguatan *Civil Society* di selatan Thailand dalam berbagai bidang diantaranya: agama dan budaya, perempuan dan anak, pemuda, sumberdaya alam dan lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, politik dan perdamaian dan hak azazi manusia. Dalam bidang agama dan budaya misalnya *Civil society Assembly For Peace* (CAP) telah mampu membangkitkan kesadaran indentitas cultural masyarakat patani yang selama ini tabu di bicarakan. Dalam bidang Pendidikan *Civil society Assembly For Peace* berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Pendidikan melalui pelatihan-pelatihan guru. Dalam bidang lingkungan dan sumber daya alam *Civil society Assembly For Peace* mengadvokasi masyarakat dalam mempertahankan sungai Saiburi, sebuah sungai yang terdapat di diprovinsi Pattani agar tidak dieksploitasi oleh pemerintah Thailan.
2. Keberadaan *Civil society Assembly For Peace* (CAP) sebagai sebuah *Non-Government Organization* di selatan thailand mendapat dukungan penuh dari masyarakat. dukungan itu diberikan dalam bentuk materil dan moral. Hal ini terlihat dari beberapa program advokasi yang dilakukan oleh *Civil society Assembly For Peace* pendanaanya didukung oleh masyarakat
3. Sebagai sebuah NGO, kehadiran *Civil Society Assembly for Peace* (CAP) dalam rangka penguatan *Civil Society* di selatan Thailand dihadapkan pada dua tantangan besar yakni tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal yakni sulitnya menyatukan visi organisasi-organisasi

masyarakat sipil yang ada di selatan Thailand untuk bergerak bersama dalam rangka menciptakan kedamaian di selatan Thailand. Sementara itu, tantangan eksternal yang dihadapi oleh *Civil Society Assembly For Peace* dalam penguatan *Civil Society* di selatan Thailand adalah tekanan dan intimidasi serta pembatasan dan menutup ruang gerak Organisasi *Civil Society Assembly for Peace* (CAP) untuk menjalin Kerjasama dengan NGO-NGO yang ada diluar Thailand.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan *Civil Society Assembly For Peace* terus dapat berjuang dan memberikan kontribusinya terhadap penguatan *civil society* di selatan Thailand sehingga kedamaian yang dicita-citakan oleh masyarakat minoritas muslim di Selatan Thailand ini dapat segera terwujud
2. *Civil Society Assembly For Peace* perlu melakukan sosialisasi secara kontiniu tentang kehadiran dan kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh *Civil Society Assembly For Peace* agar muncul kesadaran kolektif masyarakat maupun organisasi-organisasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kedamaian terhadap masyarakat muslim minoritas di selatan Thailand
3. *Civil Society Assembly For Peace* perlu mengembangkan dan menjalin Kerjasama dengan NGO yang ada diberbagai negara dalam rangka penguatan *civil society* di selatan Thailand.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku dan Jurnal

- Administrator. 2019. Masyarakat Madani: Pengertian, Ciri-Ciri, Unsur, dan Pilar Penegak. <http://inforepublik.com/masyarakat-madani-pengertian-ciriciri-unsur-dan-pilar-penegak/> 15 Agustus 2022 (00:52)
- A. Malek, M. Zamberi. 1993. *Umat Islam Patani Sejarah Dan Politik*. Kuala Lumpur: Hizbi Shah Alam.
- A. SHikam, *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3S, 1996.
- Archer Clive, 2001. *International Organization: Third Edition*, London: Routledge.
- Bahr Syamsul, 2014. *Partisipasi Non Government Organization (Ngo) Dalam Mewujudkan Good Governance: Soppeng*
- Capakiya, Ahmad Umar. 2002. *Politik Dan Perjuangan Masyarakat Islam Di Selatan Thailand*. edited by Bangi. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia.
- CISForm. Hal. 18. INSISTPress. Hal. 8
- Ginanja, Wahyu Rozzaqi. 2020. "Peran NGO Dalam Tata Kelola Global: Keterlibatan Amnesty International Dalam UN Summit for Refugee and Migrant 2016." *Insignia Journal of International Relations*.
- Hanifie Haniah, Azmy Sabhana Ana, 2018. *Kekuatan-Kekuatan Politik*. Rajawali Pers: Depok
- Hayati Rina. 2021. Pengertian Teknik Pengumpulan Data, Macam, Cara Menulis, dan Contohnya. <https://penelitianilmiah.com/teknik-pengumpulan-data/> 15 Agustus 2021 (01: 28)
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Jehma Rosana, Sumardi, Sugiyanto. 2017. "The Nationalism Movement of Islam for Independence of Patani Southern Thailand (1902-1945)." *Historica* 1
- Lewis David, Paul Opoku-Mensah, 2006 . *Moving Forward Research Agendas On International NGOS: Theory, Agency And Context. Journal Of International Development*,
- Mamang., Faisol. 2017. "Peran *Civil society* Organization Dalam Proses Perdamaian Di Patani." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Media social CAP 2022, 25 Mei 2022, *Facebook Civil society Assembly For Peace (CAP).Com*.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis*

- (terjemahan). Jakarta : UI Press.
- Muslim, Ahmad Tri. 2004. *Pesan Perdamaian Di Dalam Al-Quran*. London: Pluto Press.
- Niaripen, Niaripen. 2016. "Niaripen Berislam Dan Bernegara Bagi Muslim Patani : Perspektif Politik Profetik Vol. 5, No. 2, Mei 2016." *Agama Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 5, No.
- Nur Azizah. L. 2021, Pengertian Masyarakat Madani: Ciri-ciri, Karakteristik, dan Sejarahnya. <https://www.gramedia.com/literasi/masyarakat-madani/> 11 Agustus 2022 (00:04)
- Nur, Mohd Roslan Mohd. 2017. "Konflik Selatan Thailand: Peranan Malaysia Sebagai Negara Jiran, Jabatan Kemajuan Islam."
- Putra, Nusa.2015. *Research & Development Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Parmudi Mochamad. 2015 *Kebangkitan Civil Society Di Indonesia.*, Nomor 2, Fisip UIN Walisongo
- Rizky, Mukhtali Muhammad, 2013. *Peran Non Governmental Organization (GIZ dan LSM Bina Swadaya) terhadap Klaster Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali* Volume 1 Nomor 2
- S. McLellan David, 1977 *The Theory and Practice of International Relation.*, New Delhi: Prentice Hall.
- Sufyanto, Masyarakat Tamadun 2001. *Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid* : Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&A*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrum. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Citapustaka Media. Bandung: Citapustaka Media.
- Topatimasang, Roem. (Ed). 2016. Mengubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: Wildan, Muhammad. dkk. 2014. Workshop Advokasi Sosial. Yogyakarta:
- Tuwaemaengae, Tuwaedaniya. 2013. *Patani Merdeka Di Atas Jalan Raya*. Pattani: Awan Book.
- Umar, T. Seberapa Besar Peran NGO Bagi Masyarakat. <https://emiten.com/info/peran-besar-ngo-bagi-masyarakat/> 28 juli 2022 (22:30)
- Widjojo, 1999: *Indonesia dalam Transisi menuju Demokrasi*, Jakarta: lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999,
- wulan RM, M. Mukhtali. 2013. *Peran Non-governmental Organizatoan (GIZ dan LSM Bina Swadaya) terhadap Klaster susu Sapi perah di kabupaten*

boyolali Jurnal Wilayah Dan Lingkungan Volume 1 Nomor 2,
Desember 2013, 157-174.

Wawancara:

Wawancara dengan Muhammad Aladi Dengni', Ketua Umum Civil Society Assembly for Peace (CAP) pada tanggal 12 Mei 2022

Wawancara dengan Hasan Yamadibu, Sekretaris Civil Society Assembly for Peace dan sekaligus Ketua Umum Bunga Raya Group pada tanggal 05 Mei 2022.

Wawancara dengan Aiyub Chena', Sektor Civil Society Assembly for Peace (CAP) pada tanggal 20 Mei 2022

Wawancara; dengan Abdulrohman U-seng, Sekretaris Muslim Attorney Center Foundation (MAC) pada tanggal 18 Mei 2022

Wawancara dengan Abdulloh wawaeni', tokoh agama sekaligus Sekretaris Umum Pemuda Kampung Berangae pada tanggal 07 Mei 2022.

Wawancara dengan Zakariya Khode, wartawan Patani pada tanggal 12 Mei 2022

Wawancara dengan Ni'yusron Samae, ketua pemuda Kampung Lalo' Resoh pada tanggal 07 Mei 2022

Wawancara dengan Tuanfusian Tohntae masyarakat Patani Pada tanggal 07 Mei 2022.

Facebook:

Page Facebook Bunga Raya Group Patani

Page facebook INSOUTH

Page facebook Jaringan Mangsadari Undang-undang Darurat-(JASAD)

Page Facebook JARUM : Jaringan Guru Sekolah Melayu/Tadika

Page Facebook Justice For Peace-JOP

Page Facebook Lembaga Guru untuk Penelitian System Pendidikan Nusantara

Page facebook Muslim Attorney Centre Foundation Yayasan Pusat Peguam
Muslim MAC

Page Facebook NUSANTARA

Page Facebook Pecinta Sejarah Patani-PSP

Page Facebook Persatuan Silat Harimau Patani-PerShaP

Page Facebook PERWANI

Page Facebook PICSEB

Page Facebook Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam PUKIS

Page Facebook TEMAN เครือข่ายเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Page Facebook Jaringan Wanita Membela Hak Asasi Patani (JAWANI)

page facebook YouthNet